

T
658.5
SEC
a e.1

**ANALISIS PRODUKTIVITAS PT. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TENGAH DENGAN KONSEP
"VALUE ADDED STATMENT"**

LAPORAN INTERNSHIP

*Diajukan kepada Pengelola Program Studi Magister Manajemen
Universitas Diponegoro
Untuk memenuhi sebagian syarat guna
Memperoleh derajat sarjana S - 2 Magister Manajemen*



Diajukan Oleh :

PRIMANDA SECTIADI
NIM. C.102950089

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2000**

Halaman Pengesahan

Laporan Internship berjudul :

***ANALISIS PRODUKTIVITAS PT. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TENGAH DENGAN KONSEP
"VALUE ADDED STATEMENT"***

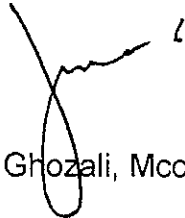
yang dipersiapkan dan di susun oleh:

Primanda Sectiadi

C.102950089

Telah di pertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal
dan di nyatakan telah memenuhi syarat untuk di terima.

Pembimbing,



(Dr. Iman Ghozali, Mcom.Akt)

Semarang,
Universitas Diponegoro
Program Pasca Sarjana
Program Magister Manajemen

Ketua Program,


(Prof, Dr., Suyudi Mangunwihardjo)

RINGKASAN

Secara umum produktivitas dapat di katakan sebagai perbandingan antara pengorbanan/ sumber daya (input) untuk menghasilkan output. Produktivitas dapat di artikan juga sebagai kemampuan seperangkat sumber – sumber ekonomi (modal, tenaga kerja, organisasi, peralatan, lahan bahan baku dll.) untuk menghasilkan sesuatu. Produktivitas yang tinggi bagi suatu perusahaan sangatlah penting, karena dengan produktivitas yang tinggi menunjukkan adanya kinerja perusahaan yang baik.

Penelitian ini bermaksud untuk mencoba mengukur produktivitas PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dengan konsep “value added statement”, di mana konsep ini sebagai pendukung laporan keuangan konvensional, yang berguna sebagai bahan untuk pengambilan suatu keputusan. Penilaian kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan nilai tambah adalah berupa perhitungan rasio – rasio produktivitas yaitu :

1. Rasio nilai tambah per karyawan
2. Rasio penjualan per tenaga kerja
3. Rasio nilai tambah per rupiah modal (1)
4. Rasio nilai tambah per rupiah modal (2)
5. Rasio nilai tambah per penjualan
6. Rasio penjualan per rupiah modal
7. Rasio modal per tenaga kerja
8. Rasio biaya tenaga kerja per jumlah karyawan
9. Rasio laba per rupiah penjualan

Hasil penelitian, konsep “Value added statement” dapat di pergunakan untuk mengukur produktivitas suatu perusahaan dengan lebih terperinci, di mana dapat di ketahui bagian yang kurang kinerjanya dan bagian yang baik kinerjanya, sehingga dapat di ambil suatu keputusan atau kebijakan yang di perlukan untuk memperbaiki kinerja yang buruk dan mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja yang baik.

Dari hasil penelitian yang di lakukan dengan menghitung rasio – rasio produktivitas tersebut menunjukkan hasil produktivitas karyawan cukup baik, demikian juga dalam penanganan aset perusahaan, namun di lihat dari penggunaan modalnya masih kurang efisien.

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan agar PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah lebih berhati – hati dalam penggunaan modalnya, walaupun kinerja perusahaan sudah cukup baik dalam menangani karyawan maupun aset perusahaan.

ABSTRACT

Among the world productivity's society, Indonesia is know as a country which has a low productivity's level. The multinational companies in Indonesia has mentioned he same thing, A study in 1986 shows that Indonesian's has a high contra productivity, which become a serious obstacle in order to measure its productivity.

To measure the productivity's level of a company there is an added value concept, as supported conventional financial report this report is rarely used in Indonesia's business

This study is aimed at applying the added value report as a company's productivity measurement, with PT. PLN (Persero) Central Java's distribution as the research's object.

The judgement of Company's performance using added value report is in the form of:

1. Value added per employee ratio
2. Sales per labour ratio
3. Value added per capital rupiah ratio (1)
4. Value added per capital rupiah ratio (2)
5. Value added per sales ratio
6. Sales per capital rupiah ratio
7. Capital per labour ratio
8. Labour cost per number of employee ratio
9. Profit per sales rupiah ratio

Where as, the result of the calculations for above ratio, such as, the employee productivity judgement is good, the handling of company asset is fair enough enough and the capital utilization and the capital utilization is not efficient.

KATA PENGANTAR

Segala puji sukur di panjatkan kehadiran Tuhan Yang Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh derajat Strata dua (S2) Magister Manajemen Universitas Diponegoro. Mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengetahuan penulis, maka di sadari tesis dengan judul "Analisis Produktivitas PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah" masih jauh dari kesempurnaan.

Dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Imam Ghozali, Mcom. Akt selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Drs. Soehardjo atas bimbingan dan petunjuknya.
3. Bapak dan ibu staf pengajar Program MM Universitas Diponegoro.
4. Bapak Drs. J. Sugiarto PH., SU atas dorongan dan materi yang telah di berikan
5. Ibu Dra. Ibu Rini Nugraheni atas dorongannya yang tidak kenal lelah.
6. Bapak – bapak dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah yang telah banyak membantu dalam memberikan materi untuk bahan penelitian.
7. Semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan kegunaan bagi pihak – pihak yang memerlukannya.

Penulis.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Ringkasan	iii
Abastract	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Balakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Pembatasan Masalah	6
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
2.1. Telaah Pustaka	8
2.2. Konsep Nilai Tambah	11
2.3. Menghitung Nilai Tambah	12
2.3.1. Metode pengurangan	12
2.3.2. Metode penjumlahan	13
2.4. Penyajian Nilai Tambah	15
2.5. Manfaat Laporan Nilai Tambah	17
2.6. Kelemahan Laporan Nilai Tambah	20
2.7. Kerangka Pemikiran Teoritis	21
2.8. Definisi Operasional Variabel	23
BAB III. METODE PENELITIAN	27
3.1. Jenis dan Sumber Data	27
3.2. Metode Pengumpulan Data	27
3.3. Teknik Pengolahan Yang Digunakan	28
3.4. Analisis Data	32

(lanjutan)

	Hal.
BAB IV. GAMBARAN UMUM PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TENGAH	34
4.1. Sejarah Singkat Perusahaan	34
4.2. Tujuan dan Misi Perusahaan	35
4.3. Program Listrik Pedesaan	37
4.4. Pengembangan Sumber Daya Manusia	39
4.5. Kepagawaian	39
4.6. Kebijakan Akuntansi Penting	43
4.7. Kinerja PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah	48
BAB V. ANALISA NILAI TAMBAH PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TENGAH	50
5.1. Perhitungan Nilai Tambah	50
5.2. Rasio Analisa Produktivitas dengan Nilai Tambah	53
5.2.1. Rasio nilai tambah per karyawan	53
5.2.2. Rasio nilai tambah per tenaga kerja	55
5.2.3. Rasio nilai tambah per rupiah modal (1)	57
5.2.4. Rasio nilai tambah per rupiah modal (2)	59
5.2.5. Rasio nilai tambah per Penjualan	61
5.2.6. Rasio penjualan per rupiah modal	63
5.2.7. Rasio modal per tenaga kerja	65
5.2.8. Rasio biaya tenaga kerja per karyawan	66
5.2.9. Rasio laba per rupiah penjualan	68
BAB VI. PENUTUP	70
6.1 KESIMPULAN	70
6.2. SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

TABEL	Hal.
2.1. Perhitungan Nilai Tambah Metode Pengurangan	14
2.2. Perhitungan Nilai Tambah Metode Penjumlahan	15
4.1. Jumlah Desa dan Pelanggan Listrik Pedesaan	38
4.2. Tempat Pembayaran Rekening Listrik Pedesaan	38
4.3. Jumlah Pegawai Menurut Golongan	40
4.4. Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan	40
4.5. Produktivitas Pegawai	41
4.6. Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah	42
4.7. Neraca PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah Tahun 1994 – 1997 (dalam juta Rp.)	44
4.8. Laba Rugi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah Tahun 1994 – 1997 (dalam juta Rp.)	45
4.9. Aktiva Tetap & Penyusutan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah Tahun 1994 – 1997 (dalam juta Rp.)	45
4.10. Piutang Pelanggan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah Tahun 1994 – 1997 (dalam juta Rp.)	48
4.11. Rentabilitas, Likuiditas, ROI dan ROE PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah Tahun 1994 – 1997 per 31 Desember	49
5.1. Perhitungan Nilai Tambah Dengan Metode Pengurangan Untuk PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah Tahun 1994 – 1997 (dalam ribuan Rp.)	52
5.2. Hasil Perhitungan Rasio Nilai Tambah per Karyawan	54
5.3. Hasil Perhitungan Rasio Penjualan per Tenaga Kerja	56
5.4. Hasil Perhitungan Rasio Nilai Tambah per Modal (1)	58
5.5. Hasil Perhitungan Rasio Nilai Tambah per Modal (2)	60

(*lanjutan*)

TABEL		Hal.
5.6.	Hasil Perhitungan Rasio Nilai tambah per Penjualan	62
5.7	Hasil Perhitungan Rasio Penjualan per Rupiah Modal	64
5.8.	Hasil Perhitungan Rasio Modal per Tenaga kErja	65
5.9.	Hasil Perhitungan Rasio Biaya Tenaga Kerja per Jumlah Karyawan	67
5.10.	Hasil Perhitungan Rasio Laba per Rupiah Penjualan	69

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR		Hal.
2.1.	Kerangka Pemikiran Teoritis	22

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal.
LAMPIRAN A	76
LAMPIRAN B	79

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sebenarnya sudah sejak tahun 1968 ingin mengupayakan peningkatan produktivitas sebagai mana dengan bukti adanya instruksi presiden No. 15 tahun 1968 untuk mendirikan Pusat Produktivitas Nasional (PPN). Namun sayang sekali bahwa selama lima belas tahun pertama berdirinya PPN tersebut tidak banyak yang bisa dikemukakan hasilnya (Prof. DR. Matthias Aroef, 1995).

Kesan yang ditangkap adalah selama lima belas tahun pertama bahkan sampai sekarang, perhatian pemerintah dan masyarakat masih terpusat pada upaya swasembada dengan pengerahan segala dana dan upaya walaupun itu mahal dan belum berhasil sempurna.

Di kalangan masyarakat produktivitas dunia, Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai produktivitas yang rendah. Hal itu juga dinyatakan oleh perusahaan – perusahaan multinasional yang masuk dan beroperasi di Indonesia . Suatu studi pada tahun 1986 memperlihatkan bahwa orang Indonesia mempunyai tingkat kontra – produktivitas yang tinggi. Tingkat kon-

tra – produktivitas yang tinggi ini merupakan hambatan yang serius untuk upaya peningkatan produktivitas.

Di samping itu masyarakat Indonesia juga dikenal sebagai masyarakat agraris yang tradisional, feodalistis. Masyarakat yang demikian akan sangat lambat untuk bisa mengadakan perubahan, atau lebih dikenal sebagai masyarakat statis. Ini merupakan hambatan yang amat serius pula untuk peningkatan produktivitas tadi.

Dari beberapa hasil penelitian diperoleh gambaran bagaimana perkembangan produktivitas yang terjadi di berbagai perusahaan di Indonesia, baik yang besar maupun yang kecil.

Pada dasarnya gambaran terbanyak perusahaan adalah bahwa tingkat produktivitas mereka berubah tanpa pola yang jelas, ada naik – turun secara tidak teratur. Atas dasar pertanyaan yang diajukan kepada para pemimpin perusahaan di dapatkan jawaban bahwa mereka memang tidak memberikan perhatian kepada masalah produktivitas di perusahaannya. Yang menjadi pokok perhatian mereka adalah posisi untung ruginya perusahaan. Bahkan cukup banyak juga yang pokok perhatiannya adalah kepada keberadaannya (Prof. DR. Matthias Aroef, 1995) .

Padahal dari berbagai pengalaman dan teori tujuan akuntansi keuangan adalah menginformasikan informasi yang timbul dari transaksi – transaksi perusahaan kepada pihak – pihak yang berkepentingan guna di pakai sebagai bahan pengambilan keputusan. Maka dari itu diturunkan suatu

konsep prinsip – prinsip akuntansi yang menggambarkan sudut pandang akuntansi terhadap kekayaan (ekuitas). Ada banyak teori yang muncul dalam akuntansi salah satu contohnya teori kepemilikan (*proprietary theory*), teori entitas (*theory entity*). Pada teori – teori tersebut kepentingan pelaporan hanya di tujukan bagi pemilik, seperti laba perusahaan deviden per saham. Sedangkan sekarang perusahaan tidak hanya di miliki oleh para pemiliknya saja, tetapi juga dimiliki oleh kreditur, tenaga kerja, pemerintah dan juga masyarakat umum (*stakeholder*) yang juga mempunyai kepentingan terhadap perusahaan tersebut apakah masih produktif atau tidak.

Teori akuntansi yang meliputi hal tersebut di kenal dengan nama teori enterprise (*enterprices theory*). Di dalam pelaksanaannya teori ini sangat tepat jika di terapkan pada perusahaan yang mempunyai fungsi sosial serta tanggung jawab sosial seperti PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah. Mengacu pada teori enterprise, konsep pelaporan nilai tambah dapat di gunakan. Konsep pelaporan nilai tambah menunjukkan bagaimana nilai tambah perusahaan tercipta karena peran para penyerta.

1.2. Perumusan Masalah

Pendapatan masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu. Jumlah orang miskin semakin berkurang secara absolut dan jumlah masyarakat golongan menengah yang mengkonsumsi barang – barang berteknologi tinggi semakin meningkat. Kondisi ini merupakan suatu

peluang yang baik bagi produsen produk - produk elektronik seperti AC, kulkas, TV berwarna, VCD dan sebagainya, juga bagi perusahaan penyuplai energi untuk memproduksi barang - barang tersebut termasuk PT PLN (Persero).

Peningkatan kebutuhan akan sumber energi tersebut mengakibatkan bertambahnya tuntutan masyarakat terhadap jasa pelayanan (pembayaran, pemutusan, penagihan dan lain - lain) yang diberikan perusahaan penyuplai bahan bakar, mengingat masyarakat menghadapi banyak alternatif untuk memilih jenis sumber energi yang akan digunakan. Sebagai contoh, masyarakat akan menggunakan peralatan - peralatan yang memakai bahan bakar gas jika tarif listrik dirasakan terlalu tinggi.

Perusahaan penyuplai energi listrik dalam hal ini PT PLN (Persero) harus dapat memberikan pelayanan terbaik untuk kepuasan para pelanggan, untuk meningkatkan loyalitas pelanggan sehubungan dengan usaha mempertahankan dan meningkatkan kepuasan pelanggan, motto pelayanan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah adalah **"SELANGKAH DI DEPAN"**

PT. PLN (Persero) adalah BUMN yang merupakan monopoli, sehingga sangat di mungkinkan untuk berbuat seluasnya. Hal itu tidak dapat dilaksanakan mengingat PT PLN harus menyediakan kebutuhan masyarakat yang sudah lebih rasional, sedang karyawan dan pengelola perusahaan dituntut untuk melayani kepentingan orang banyak. Orang banyak yang dimaksud antara lain adalah para pelanggan PLN. Dalam rangka ikut berpartisipasi da-

lam pencapaian tujuan negara/ pemerintah pada era globalisasi, maka PT. PLN (Persero) ingin meningkatkan pelayanan kepada konsumen agar energi listrik sebagai input memiliki peran besar dalam membantu meningkatkan produktivitas kerja perusahaan tersebut di Indonesia. Oleh sebab itu PT. PLN (Persero) harus memperhatikan tingkat produktivitasnya. Selama ini PT. PLN (persero) distribusi Jawa Tengah hanya melihat produktivitasnya dari naik turunnya dua hal yaitu kWh/ pegawai dan jumlah pelanggan/ pegawai, serta analisis laporan keuangan standar seperti laporan Rugi Laba, Neraca dan laporan arus kas.

Dari Majalah SWA 16/XIV 6 – 19 Agustus 1998 (setelah terjadinya krisis moneter) dengan tema SIAPA BISA SELAMATKAN PLN didapat laporan betapa parahnya PT. PLN, coba saja pada tahun 1998 PT. PLN rugi sebesar Rp. 14,7 triliun, memang ini diakibatkan karena selisih kurs akibat krisis moneter. Persoalan lain tingginya biaya operasional akibat naiknya harga minyak pelumas dan bahan bakar, terutama gas untuk keperluan PLTU Muara Karang. Di luar akibat terjadinya krisis moneter yang sebenarnya tidak boleh menjadi alasan timbulnya kesulitan – kesulitan atau kerugian – kerugian yang dialami PT. PLN (Persero), seharusnya PT. PLN (Persero) harus memperhatikan tingkat produktivitasnya guna mendapatkan laba dan menekan kerugian yang dialami. Dari uraian dan studi yang dilakukan Prof. DR. Matthias Aroef, mungkin benar para pimpinan perusahaan hanya memperhatikan posisi untung rugi perusahaan saja, apalagi PT. PLN (Persero)

merupakan BUMN monopoli, tanpa memperhatikan produktivitasnya. Untuk konkretnya masalah yang akan dibahas dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapannya teori enterprise melalui penyusunan laporan nilai tambah
2. Bagaimana melakukan pengukuran dan penilaian kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan nilai tambah,
3. Apakah laporan nilai tambah dapat digunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari laporan keuangan konvensional, dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan.

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini hanya dilakukan dan digunakan data dan hasil wawancara serta observasi yang dilakukan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah.

Secara lebih terperinci penelitian akan membatasi masalah dalam hal – hal sebagai berikut:

1. Menyusun atau membuat laporan nilai tambah sebagai penerapan teori enterprices, untuk melengkapi laporan keuangan perusahaan sebagai pertanggung jawaban.
2. Memerlihatkan salah satu alternatif pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan nilai tambah.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan konsep *Value Added Statemen* (Laporan Nilai Tambah) yang dapat merupakan suatu alat untuk mengukur produktivitas riil dari perusahaan, yang mana jarang atau tidak pernah digunakan oleh perusahaan – perusahaan besar maupun kecil di Indonesia, walaupun sudah sering dibahas atau diulas dalam beberapa media. Untuk itu sebagai alternatif penilaian kinerja perusahaan, *Value Added Statemen* perlu diperkenalkan kelebihan dan kekurangannya, terutama bila akan digunakan di Indonesia.

Menganalisis *Value Added Statemen* untuk perusahaan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan masukan kepada pihak PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian lebih lanjut.

BAB II KAJIAN TEORI

2.1. Telaah Pustaka

Laporan keuangan suatu perusahaan yang terdiri dari neraca, laporan rugi laba, laba yang belum di bagi, dan perubahan posisi atau arus kas serta catatan atas laporan keuangan, sebenarnya tidak lain adalah laporan pertanggung jawaban manajemen kepada para pemilik perusahaan (pemegang saham/ penyerta modal).

Pendekatan yang populer untuk menilai kondisi keuangan perusahaan adalah dengan mengevaluasi data akuntansi berupa laporan keuangan. Hal tersebut di sebabkan karena laporan keuangan di susun mengikuti kaidah standart penyusunan laporan keuangan dan di terapkan secara meluas oleh perusahaan – perusahaan. Kaidah dasar akuntansi adalah antara lain komparabilitas dan konsistensi. Dengan kaidah tersebut, laporan keuangan yang merefleksikan kinerja keuangan suatu perusahaan dapat di perbandingkan dengan perusahaan lain, atau dengan periode lain dari perusahaan itu sendiri.

Akan tetapi pendekatan tersebut membuat beberapa masalah yang krusial:

1. Laporan keuangan dari suatu perusahaan yang memiliki sejumlah divisi dari industri yang berlainan akan sukar di bandingkan dengan perusahaan lain atau dengan data suatu industri. Dengan demikian menilai perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan cenderung lebih baik pada perusahaan yang relatif kecil dengan produk tunggal di banding dengan perusahaan besar yang multiproduk.
2. Terjadinya distorsi karena pengaruh inflasi dan penggunaan data historis dalam akuntansi. Dengan demikian laba akuntansi akan di pengaruhi oleh tingkat inflasi yang di alami selama umur aset tersebut. Salah satu indikator yang selama ini cukup populer di gunakan dalam mengukur kinerja adalah *Return on Investment* (ROI). Indikator ini mengandung distorsi cukup besar terutama pada saat perekonomian dalam kondisi inflasi. Dalam kondisi inflasi, ROI akan cenderung tinggi akibat laba yang relatif tinggi. Laba perusahaan akan naik secara cukup signifikan dalam kondisi inflasi, karena di satu pihak manajemen perusahaan melakukan penyesuaian terhadap harga – harga dari produk/ jasa yang di jual. Di lain pihak beberapa komponen biaya masih di nilai dengan harga historis, yang tentunya tidak mengalami penyesuaian seperti depresiasi dari aset – aset perusahaan, maka distorsi yang terjadi tentu lebih besar. Karena laba sebagai pembilang di satu sisi makin besar, sementara aset perusahaan sebagai penyebut di sisi lainnya menyusut karena penjualan.
3. Laporan keuangan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus di dukung oleh catatan atas laporan keuangan. Informasi ini harus di cermati karena mungkin memuat potensi masalah yang dapat sangat mempengaruhi kondisi keuangan suatu perusahaan.
4. Kesulitan dalam menginterpretasikan hasil analisa. Misalkan *quick ratio* yang tinggi apakah bagus, karena kuatnya likuiditas perusahaan. Atau, justru jelek karena perusahaan memegang kas yang berlebih yang justru tidak produktif. Jika *total asset turnover ratio* tinggi, apakah karena pen-

jualan yang besar atau ketidak mampuan perusahaan untuk menambah asset baru.

5. Perbedaan dalam perlakuan akuntansi dapat menimbulkan distorsi dalam membandingkan rasio. Misalnya, dalam penilaian persediaan metode LIFO atau FIFO akan memberikan harga pokok yang jauh berbeda dalam kondisi inflasi yang tinggi.
6. Adanya praktek "*Window dressing*" tentunya membuat laporan keuangan terlihat lebih bagus.

Laporan rugi – laba hanya memberikan tentang kesejahteraan perusahaan kepada para pemegang saham saja, sehingga kelompok lain yang ada dalam perusahaan seperti para pegawai, laporan rugi – laba menjadi terbatas kegunaannya.

Untuk memberikan laporan kesejahteraan perusahaan kepada beberapa kelompok yang berkepentingan terhadap perusahaan, dapat dilakukan dengan menyusun laporan tambahan selain laporan keuangan yang biasa, yaitu laporan nilai tambah (*Value added statement*)

Laporan nilai tambah menunjukkan pendapatan suatu perusahaan sebagai kesatuan usaha dan bagaimana nilai tambah ini di distribusikan kepada kelompok – kelompok yang menyumbangkan terciptanya nilai tambah tersebut. Laporan nilai tambah memandang bahwa suatu perusahaan tidak lain adalah usaha kolektif dari beberapa kelompok orang yaitu pemegang saham, kreditur, pegawai perusahaan dan pemerintah.

2.2. Konsep Nilai Tambah

Konsep nilai tambah pertama kali di perkenalkan oleh para ekonom pada akhir abad ke 18. Konsep ini di pakai sebagai alat untuk mengukur output bersih suatu perusahaan. Dalam tahun 1950 an konsep nilai tambah di kembangkan lebih jauh oleh para ahli statistik dan ahli manajemen sebagai alat untuk mengukur produktivitas. Oleh karena itu konsep nilai tambah berorientasi kepada masalah produksi bukan kepada masalah keuangan.

Nilai tambah secara umum dapat di definisikan sebagai perbedaan antara penghasilan kotor yang di terima oleh suatu perusahaan dari hasil penjualan suatu produk dan jasa dengan jumlah uang yang di bayar untuk membeli bahan baku dan jasa lain yang di sediakan oleh pemasok dari luar perusahaan. Dari definisi ini dapat di simpulkan bahwa nilai tambah pada dasarnya adalah hasil penjualan di kurangi dengan biaya – biaya dan jasa pihak luar yang di gunakan dalam rangka menciptakan penghasilan tersebut. Sebagian dari hasil penjualan di pakai untuk membayar bahan baku dan jasa yang di beli dari masyarakat di luar perusahaan. Sisanya adalah kekayaan atau nilai tambah perusahaan yang di ciptakan oleh para pegawai yang ada dalam perusahaan yang bekerja dengan sejumlah modal yang berasal dari pemegang saham, kreditur dan pemakaian fasilitas umum yang di sediakan pemerintah.

2.3. Menghitung Nilai Tambah

Nilai tambah dapat di hitung dengan metode pengurangan atau memakai metode penjumlahan. Dalam praktek di mungkinkan terjadi variasi dalam hasil perhitungannya tergantung dari lingkup hal yang di anggap sebagai bahan dan jasa yang di beli.

2.3.1. Metode pengurangan

Pada metode pengurangan nilai tambah di peroleh sebagai hasil penjualan atau pembelian dari usaha produktif perusahaan di kurangi jumlah yang di bayar untuk bahan - bahan yang di beli dan jasa-jasa yang di berikan oleh pihak luar, hal ini dapat dilihat tabel pada tabel 2.1.

Perhitungan nilai tambah di sarankan untuk memakai nilai tambah kotor (bukan bersih) di mana pengurangan nilai harus di pisahkan dari barang atau jasa yang di beli dan di anggap sebagai bagian dari nilai tambah. Lebih jauh lagi di usulkan agar perhitungan aktiva di himpun berdasarkan nilai tambah historisnya, sehingga untuk hal ini di gunakan prosedur standart akutansi penyusutan. Lepas dari itu, beberapa kalangan orang menafsirkan bahwa penyusutan adalah bagian dari penggunaan modal.

Untuk lebih jelasnya perhitungan metode nilai pengurangan dapat di lihat pada tabel 2.1. di bawah ini:

Tabel 2.1.
Perhitungan Nilai Tambah Metode Pengurangan

Penjualan	d
Barang dan jasa yang di beli	
Bahan baku	
Bahan pengemasan	
<i>Total (bahan yang digunakan)</i>	a
Overhead Produksi	
Pekerjaan subkontrak	
Sewa	
Air dan listrik	
Biaya transport	
Biaya pemeliharaan mesin	
Biaya suplai dan gudang	
Biaya lain – lain	
<i>Total (overhead produksi)</i>	b
Biaya administrasi dan umum	
Sewa	
Air, listrik dan telepon	
Pos dan telegram	
Percetakan dan suplai alat – alat kantor	
Biaya kendaraan	
Transportasi dan pengangkutan	
Biaya perjalanan	
Biaya advertensi	
Hiburan	
Asuransi	
Perbaikan umum	
Biaya bank	
Biaya akuntan dan audit	
Biaya bantuan hukum dan jasa profesional lain	
Biaya umum	
<i>Total (biaya administrasi dan umum)</i>	c
<i>Total (barang dan jasa yang dibeli)</i>	$e = a + b + c$
Nilai tambah	$f = d - e$

Sumber : Ir. Ricardo Manurung (*Peningkatan produktivitas dan hubungan industrial Pancasila*)

2.3.2. Metode penambahan

Metode penambahan kelihatannya lebih mudah, akan tetapi kadang - kadang dapat membawa seseorang untuk salah mengasumsikan bahwa nilai tambah seolah - olah timbul sebagai akibat dari pembayaran upah, pajak, bunga pinjaman, mengesampingkan depreciasi, dan menghasilkan laba yang baru, hak ini memutar balikkan kebenaran, karena akibat terciptanya nilai tambah maka perusahaan dapat membayar upah, pajak dan bunga. Demikian pula, nilai tambah inilah yang menyediakan dana untuk depreciasi dan laba. Jadi, suatu peningkatan upah tidaklah menaikkan nilai tambah tetapi sekedar menurunkan laba. Serupa dengan itu, suatu pengurangan upah tidak mengurangi nilai tambah tetapi sekedar menaikkan laba. Pada metode penjumlahan menghitung nilai tambah di laksanakan dengan menjumlahkan komponen - komponen laba (rugi) setelah pajak, biaya ketenagakerjaan, biaya pinjaman, depreciasi dan pajak - pajak, untuk lebih jelasnya hal ini dapat di lihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Perhitungan Nilai Tambah Metode Penjumlahan

Laba (rugi) setelah pajak Penghasilan di tahan Dividen Bunga bank <i>Total</i>	a
Biaya ketenagakerjaan Upah dan gaji (termasuk gaji direksi) Dana pensiun kontribusi perusahaan <i>Total (biaya ketenagakerjaan)</i>	b
Biaya pinjaman Pinjaman bersyarat Pinjaman lain <i>Total (biaya pinjaman)</i>	c
Depresiasi Gedung Pabrik, peralatan dan mesin <i>Total (depresiasi)</i>	d
Pajak – pajak Pajak penghasilan Pajak kekayaan Pajak Upah <i>Total (pajak)</i>	e
Nilai tambah	$f = a + b + c + d + e$

Sumber : Ir. Ricardo Manurung (*peningkatan produktivitas dan hubungan industrial Pancasila*)

2.4. Penyajian Nilai Tambah

Laporan nilai tambah dapat di sajikan dalam dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Bagian yang memperlihatkan besarnya nilai tambah yang di ciptakan oleh perusahaan, di gunakan adalah perhitungan nilai tambah dengan metode pengurangan.

2. Bagian yang memperlihatkan pendistribuan nilai tambah kepada *stake holder*, di gunakan perhitungan nilai tambah dengan metode penambahan.

Konsep penyajian nilai tambah dalam laporan keuangan merupakan konsep yang lebih luas daripada penyajian laba perusahaan dalam laporan rugi laba. Persamaan yang membentuk laporan rugi laba adalah :

$$R = S - B - \text{Dep} - W - I - \text{Div} - T \quad \dots\dots\dots (2.1.)$$

- Di mana:
- R = Laba di tahan
 - S = Pendapatan penjualan
 - B = Jumlah barang dan jasa yang di beli
 - Dep. = Depresiasi per tahun
 - W = Upah dan gaji per tahun
 - I = Biaya bunga per tahun
 - Div. = Total deviden per tahun
 - T = Pajak

Karena laporan Nilai Tambah merupakan modifikasi lebih lanjut dari laporan rugi - laba, maka untuk menyajikannya di gunakan persamaan yang juga merupakan modifikasi dari persamaan laba rugi yaitu:

$$S - B - \text{DEP} = W + I + \text{Div} + T + R \quad (\text{nilai tambah netto}) \quad \dots\dots (2.2.)$$

Atau

$$S - B = W + I + \text{Div} + T + R \quad (\text{nilai tambah bruto}) \quad \dots\dots (2.3.)$$

Dengan demikian terdapat dua pilihan penyajian laporan Nilai Tambah, yaitu nilai tambah netto (*net value added*) dan nilai tambah bruto (*gross value added*). Pada laporan Nilai Tambah netto, depresiasi di perlakukan sebagai pengurang hasil penjualan (S). Hasil penjualan (s) di kurangi dengan jumlah barang dan jasa yang di beli (B) dan depresiasi (Dep.) merupakan nilai tambah yang di peroleh.

2.5. Manfaat Laporan Nilai Tambah

Adapun laporan nilai tambah mempunyai manfaat yang dapat di lihat berikut ini:

1. Pengungkapan

Laporan nilai tambah merupakan usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan relevan tentang kegiatan perusahaan dengan memasukkan informasi beberapa kelompok orang yang berkepentingan terhadap perusahaan, seperti pemilik, kreditur, pegawai dan pemerintah. Penentang laporan nilai tambah menyatakan bahwa sebenarnya informasi yang disajikan dalam laporan nilai tambah sudah ada di laporan tahunan perusahaan, sehingga menyajikan laporan nilai tambah menyatakan tidak ada gunanya sama sekali. Bagi pemakaian laporan keuangan yang sudah ahli, hal ini dapat di benarkan karena mereka dengan mudah mencari informasi yang sama dari laporan tahunan perusahaan. Namun demikian, perlu diingat bahwa tujuan utama laporan keuangan adalah memberikan informasi adalah memberikan informasi yang berguna bagi berbagai macam pemakai laporan keuangan yang memiliki kebutuhan dan kemampuan menganalisa yang berbeda. Oleh sebab itu adanya metode

alternatif penyajian informasi yang sama akan menghasilkan manfaat bagi banyak pemakai laporan keuangan.

2. Sederhana dan fleksibel

Laporan nilai tambah sangat mudah di susun hanya dengan memodifikasi laporan laba – rugi. Di samping itu bentuk dan isi laporan nilai tambah lebih mudah di pahami di bandingkan dengan laporan rugi – laba, khususnya bagi para pegawai, pemilik modal dan pemerintah, karena laporan tersebut menglompokkan pihak – pihak karena laporan tersebut pihak – pihak yang ikut menyumbang terciptanya nilai tambah perusahaan. Namun demikian, para pemakai laporan nilai tambah harus memiliki pemahaman isi informasi yang di sajikan, jika tidak kesederhanaan laporan nilai tambah mejadi menyesatkan. Laporan nilai tambah memiliki fleksibilitas dalam penyusunannya, karena dapat di susun atas dasar biaya historis, constant purchasing power bahkan atas dasar current cost accuonting sekalipun.

3. Hubungan Industrial

Laporan nilai tambah di maksudkan dapat mencerminkan adanya team sprit di dalam organisasi perusahaan. Masing – masing pihak yang ikut menyumbangkan terciptanya kekayaan atau nilai tambah perusahaan akan mengetahui berapa besarnya sumbangan mereka terhadap penciptaan nilai tambah. Lain halnya dengan laporan rugi – laba yang hanya menitik beratkan pada besarnya laba yang tidak lain adalah penghasilan dari pemegang saham. Laporan nilai tambah mempunyai beberapa kelebihan di bandingkan dengan laporan rugi – laba. *Pertama*, laporan nilai tambah menggambarkan peranan pegawai di dalam perusahaan oleh karena di pandang sebagai pihak yang ikut menyumbangkan terciptanya kekayaan perusahaan. Sedangkan di dalam laporan rugi – laba di perlakukan sebagai beban. *Kedua*, dengan pemberian incentive kepada para pegawai atas dasar besarnya sumbangan mereka terhadap nilai tambah peusahaan,

akan dengan sendirinya akan menaikkan motivasi pegawai di dalam proses penciptaan kekayaan perusahaan. *Ke tiga*, laporan nilai tambah dapat dipakai sebagai referensi guna penyelesaian kasus – kasus perburuhan.

4. Kebijakan Ekonomi

Laporan nilai tambah berperan dalam memperbaiki kegiatan analisa ekonomi, oleh karena laporan nilai tambah konsisten dengan analisa input – output yang sering di pakai para ekonom untuk menghitung pendapatan nasional. Apabila setiap perusahaan secara konsisten menyajikan laporan nilai tambah, maka pemerintah akan mampu mengumpulkan data ekonomi secara akurat dan tepat waktu yang pada gilirannya akan memberikan data yang akurat bagi keperluan peramalan dan penyusunan kebijakan ekonomi pemerintah.

5. Analisa Komparasi

Laporan nilai tambah memberikan tambahan kriteria yang dapat di pakai sebagai dasar untuk menilai dan membandingkan prestasi suatu perusahaan dengan perusahaan lain, Dengan mengetahui besarnya rasio antara nilai antara nilai tambah dan gaji pegawai akan bisa di prediksi sehat tidaknya suatu perusahaan. Di samping itu laporan nilai tambah dapat pula di pakai sebagai alat untuk mengukur besar dan pentingnya suatu perusahaan. Besarnya suatu perusahaan biasanya tercermin dari nilai penjualannya, tetapi perlu diingat bahwa angka nilai penjualan bisa menyesatkan jika besarnya turn over perusahaan hanyalah pencerminan dari biaya pembelian produk dari perusahaan lain yang di jual kembali kepada konsumen. Begitu juga dengan besarnya modal perusahaan yang sering pula di pakai untuk mengukur besarnya perusahaan. Perusahaan yang padat modal dan hanya memperkerjakan sedikit pegawai akan tampak lebih besar dan penting di bandingkan perusahaan padat karya. Laporan nilai tambah memberikan informasi tentang besarnya penciptaan

kekayaan bersih perusahaan, serta distribusi kekayaan bersih perusahaan, serta distribusi kekayaan ini kepada beberapa kelompok yang terlibat dalam proses penciptaan kekayaan tersebut.

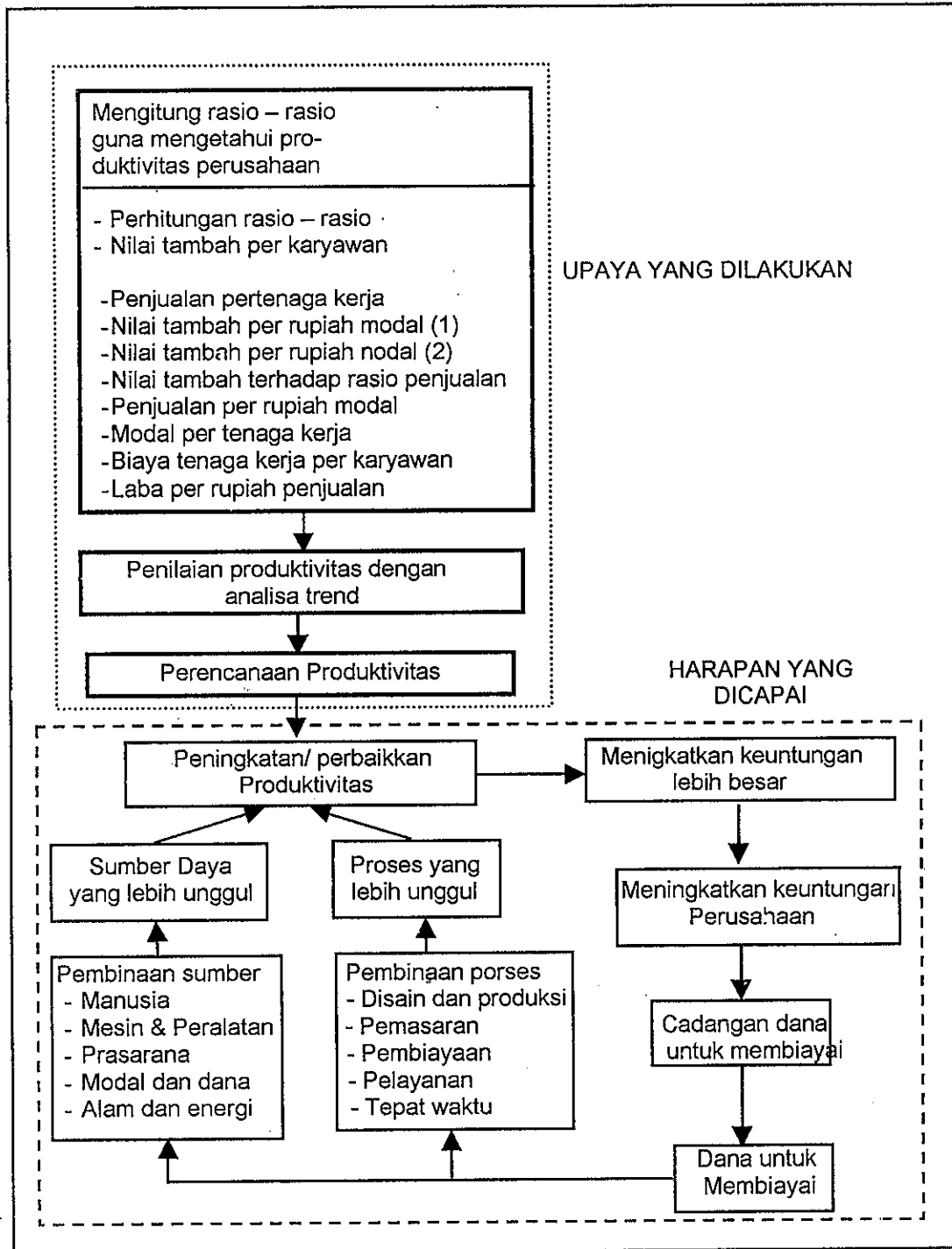
2.6. Kelemahan Laporan Nilai Tambah

Adapun laporan nilai tambah mempunyai kekurangan, bagi para pemakai yang tidak memahami konsep laporan keuangan, laporan nilai tambah dapat membingungkan mereka sebab besarnya nilai tambah suatu perusahaan bisa baik dan sebaliknya laba perusahaan turun. Hal ini menunjukkan kekayaan yang di ciptakan perusahaan lebih besar di distribusikan ke pegawai. Jadi ada transfer kekayaan dari pemegang saham ke pegawai perusahaan. Dengan menyajikan laporan nilai tambah ada kecendrungan bahwa manajemen akan selalu memaksimalkan besarnya nilai tambah yang ada gilirannya akan menyesatkan dalam mengambil keputusan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mempertimbangkan membuat sendiri atau membeli dari luar suatu komponen khusus (membuat sendiri mengeluarkan biaya Rp. 2.500,- sedangkan membeli dari luar mengeluarkan biaya Rp. 2.000,-). Jika tujuan utama memaksimalkan nilai tambah maka perusahaan akan membuat komponen tersebut. Jika tujuan utama adalah laba maka perusahaan akan membeli komponen tersebut. Maka jelaslah untuk mengambil keputusan dengan konsep nilai tambah memerlukan ketelitian dan perlu pertimbangan banyak faktor.

2.6. Kerangka Pemikiran Teoritis

Daur produktivitas memperlihatkan bahwa peningkatan produktivitas harus di dahului oleh kegiatan pengukuran produktivitas. Dengan pengukuran produktifitas maka akan di peroleh data-data informasi. Setelah menganalisis informasi dapat di ketahui bagaimana kondisi kinerja perusahaan sebenarnya. (lihat gambar 2.1)

Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran teoritis



Dengan mengetahui kondisi perusahaan barulah di rencanakan sejauh mana akan di tingkatan produktivitas perusahaan.

2.7. Definisi Operaional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat dan di gunakan beberapa Definisi operasional variabel yaitu:

1. Nilai Tambah, pada umumnya orientasi perusahaan hanya kepada keuntungan dan melihat pengeluaran untuk tenaga kerja adalah sebagai biaya. Berbeda dengan konsep nilai tambah, di mana tenaga kerja tidak hanya sebagai faktor-faktor produksi tetapi mitra manajemen untuk menciptakan keuntungan perusahaan
2. Orientasi kepada keuntungan menyebabkan manajemen dan tenaga kerja duduk pada sisi yang berlawanan, sehingga untuk meningkatkan laba maka pengeluaran kepada tenaga kerja di tekan serendah mungkin. Sebaliknya orientasi kepada nilai tambah menyebabkan manajemen dan tenaga kerja duduk pada satu sisi. Di mana tenaga kerja adalah mitra dari manajemen untuk menciptakan kekayaan produksi. Maka tenaga kerja bersama-sama manajemen akan selalu berusaha menciptakan nilai tambah yang lebih besar untuk dapat meningkatkan laba, kesejahteraan tenaga kerja.
3. Rasio nilai tambah per karyawan ini mencerminkan jumlah kekayaan yang di ciptakan oleh perusahaan relatif terhadap jumlah karyawan

yang ada. Namun, Rasio ini tidak saja mencerminkan efisiensi dari tenaga kerjanya dalam menghasilkan keluaran, tetapi juga faktor lainnya, seperti investasi modal, efisiensi pemimpin perusahaan, sikap kerja, dampak harga dan permintaan akan produk yang di hasilkan.

4. Rasio penjualan per tenaga kerja, walaupun hasil menunjukkan volume penjualan yang di hasilkan oleh setiap karyawan perusahaan, hal itu tidaklah harus mencerminkan efisiensi atau efektivitas yang sesungguhnya dari perusahaan tersebut. Rasio ini dapat sangat tinggi, tetapi mempunyai biaya bahan atau nilai subkontrak yang relatif tinggi. Tingkat Rasio antar perusahaan industri dapat berbeda banyak dan dapat juga merupakan suatu pencerminan kebijaksanaan perusahaan yang di terapkan. Hal itu juga sangat di pengaruhi oleh keadaan pasar.
5. Rasio nilai tambah per rupiah modal (1), rasio Ini menunjukkan tingkatan penggunaan dari aset tetap. Namun, seperti halnya nilai tambah per karyawan, maka rasio ini dapat di liputi oleh inflasi dan situasi pasar. Terlebih-lebih lagi rasio ini dapat di pengaruhi oleh perbedaan dalam kebijaksanaan penilaian dan apakah aset tersebut di miliki sendiri atau di pinjam.
6. Rasio nilai tambah per rupiah modal (2), rasio Ini menunjukkan seberapa intensifnya modal di gunakan, yaitu tingkat penggunaan aset,

pengawasan atau tingkat persediaan barang dan para debitur serta efisiensi pengelolaan uang tunai. Hal itu di pengaruhi oleh faktor-faktor ekstern, seperti rasio nilai tambah pada aset tetap nyata.

7. Rasio nilai tambah terhadap rasio penjualan, rasio ini cenderung tetap stabil untuk perusahaan tertentu, yang mencerminkan kebijakan usaha yang di terapkan, maupun tipe kegiatan industri. Rasio ini dapat di pergunakan untuk mengukur tingkat penggunaan bahan-bahan dan jasa-jasa yang di beli, dan perubahan dalam perbedaan harga antara produk dan pembelian. Namun, rasio ini dapat berfluktuasi karena perubahan dalam tingkat persediaan. Rasio dapat juga di pandang sebagai besarnya margin yang tersedia. Dengan hal lainnya adalah sama, meningkat/ menurun dalam rasio ini akan berarti suatu kenaikan/ penurunan terhadap imbalan bagi tenaga kerja dan/ atau modal.
8. Rasio modal per tenaga kerja, rasio ini menunjukkan apakah suatu perusahaan padat modal atau padat karya. Tingkat rasio adalah hasil dari kebijakan usaha.
9. Rasio biaya tenaga kerja per karyawan, rasio ini merupakan ukuran dari total balas jasa per karyawan. Balas jasa ini tidak saja berisikan upah dan gaji, tetapi juga termasuk bonus dan iuran pensiun yang di bayarkan oleh perusahaan.

10. Rasio laba per rupiah penjualan, rasio ini mencerminkan bagian penjualan yang tersisa di perusahaan setelah di kurangi dengan semua biaya. Oleh karena itu rasio ini mencerminkan juga hubungan antara jumlah biaya yang di keluarkan dan pendapatan penjualan yang di peroleh.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Dan Sumber Data

Data yang di perlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Data - data dalam penelitian ini sebagian besar menggunakan data sekunder dari perusahaan yang berupa data - data keuangan (neraca, rugi/ laba serta rincian - rincian data keuangan lainnya seperti, rata - rata jumlah tenaga kerja untuk suatu periode, biaya operasional pabrik), untuk periode tahun 1995 sampai dengan tahun 1997.
2. Sebagai data penunjang di butuhkan data primer yang merupakan hasil wawancara dengan pejabat - pejabat yang berwenang.

3.2. Metode Pengumpulan Data

WAWANCARA:

Di lakukan langsung dengan pejabat - pejabat perusahaan yang di tunjuk. Wawancara disini di lakukan baik secara individual dengan pejabat maupun secara kelompok karyawan terpilih. Dalam wawancara di bantu dengan daftar pertanyaan.

Data - data sekunder dari perusahaan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah yang berupa Data dan Statistik tahun 1994 sampai dengan tahun 1997.

3.3. Teknik Pengolahan Yang Di gunakan

Untuk mengukur kinerja dari perusahaan dapat di lakukan dengan mengukur produktivitas dari perusahaan tersebut. Aspek paling penting dari pengukuran produktivitas adalah evaluasi dari tinggi rendahnya rasio - rasio. Sebuah rasio dapat lebih tinggi atau rendah terhadap standar (rata - rata industri) atau relatif terhadap tingkat aktivitas periode sebelumnya. Untuk menentukan pengukuran produktivitas akan di lakukan dengan analisa trend dengan data tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 terhadap rasio - rasio berikut ini:

- Nilai tambah per karyawan
- Penjualan pertenaga kerja
- Nilai tambah per rupiah modal (1)
- Nilai tambah per rupiah modal (2)
- Nilai tambah terhadap rasio penjualan
- Penjualan per rupiah modal
- Modal per tenaga kerja
- Biaya tenaga kerja per karyawan
- Laba per rupiah penjualan

Nilai Tambah Per Karyawan

- Rasio : Nilai tambah per karyawan
- Perhitungan :
$$\frac{\text{Nilai tambah}}{\text{Jumlah tenaga kerja}}$$
- Unit : Rupiah per karyawan
- Arti Rasio yang tinggi : Makin tinggi Rasio ini berarti lebih banyak hal yang menguntungkan dari faktor - faktor yang di sebutkan di atas terhadap kemampuan menciptakan kekayaan perusahaan
- Arti Rasio yang rendah : Dapat menunjukkan jumlah karyawan, atau prosedur kerja yang kurang menguntungkan.

Penjualan Per Tenaga Kerja

- Rasio : Rupiah per tenaga kerja
- Arti Rasio yang tinggi : Mencerminkan efisiensi atau strategi perusahaan yang baik. Makin tinggi Rasio, makin baik keadaan perusahaan tersebut.
- Arti Rasio yang rendah : Mencerminkan ketidak efisienan atau pemasaran kurang baik. Meskipun dapat di akibatkan oleh kebijaksanaan usaha yang di buat perusahaan berkenaan dengan perputaran penjualan (turnover) yang rendah, tetapi laba/ nilai tambah yang tinggi.

Nilai Tambah Per Rupiah Modal (1)

- Rasio : Nilai tambah per rupiah modal
- Perhitungan :
$$\frac{\text{Nilai tambah}}{\text{Harta tetap berujud (rata - rata untuk suatu periode)}}$$
- Unit : Jumlah bersih
- Arti Rasio yang tinggi : Mencerminkan efisiensi dari cara memanfaatkan aset. Makin tinggi rasio akan makin baik bagi perusahaan
- Arti Rasio yang rendah : Mencerminkan ketidak efisienan dalam pemanfaatan aset atau investasi yang berlebihan dalam aset tetap.

Nilai Tambah Per Rupiah Modal (2)

- Rasio : Nilai tambah per karyawan

Perhitungan :
$$\frac{\text{Nilai tambah}}{\text{Modal Operasi}}$$

(rata - rata untuk suatu periode)

Unit : Jumlah bersih
Arti Rasio yang tinggi : Menunjukkan bahwa aset - aset di gunakan secara produktif, persediaan barang dan para debitur di awasi secara ketat, dan uang tunai di atur serta di kelola dengan baik. Makin tinggi rasio, makin baik bagi perusahaan.

Arti Rasio yang rendah : Berarti, ketidak efisienan dalam penggunaan aset, kapasitas yang melebihi batas, tingkat persediaan barang dan para debitur yang terlalu tinggi dan/ atau penggunaan uang tunai di bawah optimal.

Nilai Tambah Terhadap Rasio Penjualan

Rasio : Nilai tambah terhadap nilai penjualan

Perhitungan :
$$\frac{\text{Nilai tambah}}{\text{Penjualan}} \times 100$$

Unit : Persen (%)
Arti Rasio yang tinggi : Tingkat maksimum rasio adalah 100%, jika tidak ada pembelian bahan - bahan atau penggunaan jasa - jasa dari luar. Suatu rasio yang tinggi dapat mencerminkan kebijaksanaan yang di lakukan efisien dalam penggunaan pembelian, perbedaan harga yang menguntungkan antara produk dan pembelian, atau pengawasan yang baik terhadap persediaan.

Arti Rasio yang rendah : Jika rasio yang rendah buka karena kebijaksanaan yang di buat, maka dapat mencerminkan ketidak efisienan dalam penggunaan pembelian, harga - harga yang tidak menguntungkan untuk produk - produk dan pembelian, atau pengawasan yang kurang baik terhadap persediaan. Suatu perusahaan dengan nilai tambah terhadap rasio penjualan yang rendah biasanya lebih mudah di pengaruhi oleh faktor - faktor ekstern. Misalnya, perubahan - perubahan kecil dalam harga pembelian dapat banyak mempengaruhi biaya keseluruhan, karena perusahaan sangat tergantung pada pembelian - pembelian tersebut.

Penjualan per Rupiah Modal

Rasio : Penjualan per rupiah modal

Perhitungan :
$$\frac{\text{Penjualan}}{\text{Modal Operasi}}$$

(rata - rata untuk suatu periode)

Penjualan
Aset tetap nyata
(rata - rata untuk suatu periode)

- Unit : Jumlah bersih
Arti Rasio yang tinggi : Menunjukkan penggunaan modal yang efisien, atau pemasaran yang baik. Makin tinggi rasio tersebut, makin baik bagi perusahaan.
Arti Rasio yang rendah : Mencerminkan ketidak efisienan penggunaan modal atau pemasaran yang tidak memuaskan

Modal per Tenaga Kerja

Rasio : Modal per tenaga kerja

Perhitungan : $\frac{\text{Modal Operasi (rata - rata untuk suatu periode)}}{\text{Jumlah karyawan (rata - rata untuk suatu periode)}}$

- Unit : Rupiah per tenaga kerja
Arti Rasio yang tinggi : Menunjukkan bahwa perusahaan tersebut adalah padat modal
Arti Rasio yang rendah : Menunjukkan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan padat karya

Biaya Tenaga Kerja Per Karyawan

Rasio : Biaya tenaga kerja per karyawan

Perhitungan : $\frac{\text{Biaya Tenaga Kerja}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja (rata - rata untuk suatu periode)}}$

- Unit : Rupiah per Tenaga Kerja
Arti Rasio yang tinggi : Berarti penghasilan yang tinggi dari karyawan individual.
Arti Rasio yang rendah : Berarti penghasilan yang rendah dari karyawan individual.

Laba Per Rupiah Penjualan

Rasio : Laba per rupiah penjualan

Perhitungan : $\frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Penjualan}} \times 100$

Unit : Persen (%)

- Arti Rasio yang tinggi : Sepanjang pembayaran kepada karyawan mencukupi, maka rasio haruslah setinggi mungkin. Hal ini berarti bahwa perusahaan mendapatkan banyak hasil dari sejumlah penjualan tertentu.
- Arti Rasio yang rendah : Kecuali rasio yang rendah di sebabkan oleh sifat suatu industri, hal itu biasanya menunjukkan bahwa biaya produksi terlalu tinggi, yang berakibat laba yang di terima sedikit.

Data penelitian yang di dapat akan di olah dengan menggunakan program Microsoft Excel yang selanjutnya di transfer ke dalam paket program Harvard Graphic.

3.4. Analisis Data

Dari hasil pengolahan data dengan bantuan program komputer tersebut akan di baca trend dari masing - masing rasio untuk periode waktu dari tahun 1994 sampai dengan 1997, di mana dapat di lihat rasio mana yang perlu di benahi dan rasio mana yang perlu di pertahankan bahkan jika mungkin di naikkan.

Peningkatan produktivitas memang merupakan hal yang perlu di upayakan semua perusahaan dan semua manajemen perusahaan perlu menjadi bagian integral dari kegiatan manajerialnya. Meskipun demikian peningkatan produktivitas bukanlah sekedar mengejar rasio keluaran terhadap masukan yang setinggi mungkin saja, tetapi hal itu perlu di kaitkan secara nyata dengan misi, peran dan fungsi dari perusahaan tersebut. Hal itu berarti pula bahwa upaya peningkatan produktivitas perlu menjadi suatu

upaya strategik yang mendapat dukungan sepenuhnya dari pimpinan perusahaan dan seluruh karyawannya.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TENGAH

4.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1969 Lembaran Republik Indonesia No. 40 tahun 1969, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2904, tentang Usaha Negara yang berbentuk perusahaan, maka Perusahaan Listrik Negara sebagai Badan Usaha Milik Negara di ubah menjadi Perusahaan Umum (Perum). Perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 tahun 1972, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 25 tahun 1972, tambahan No. 2983. Kemudian di ubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 tahun 1981, tambahan No. 3207 tentang "Perusahaan Umum Listrik Negara".

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 tahun 1972 juncto Peraturan Pemerintah Indonesia No. 54 tahun 1981 dan Undang – Undang No. 15 tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 1990, ditetapkan bahwa PLN adalah badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha

ketenagalistrikan bagi kepentingan umum, yaitu industri, komersial, rumah tangga dan kegiatan sosial.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 bentuk Badan Usaha Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara di ubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), dan berdasarkan akta notaris tanggal 30 Juni 1994 di dirikanlah Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.

4.2. Tujuan dan Misi Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972, kemudian di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1990 maksud dan tujuan di dirikannya Perusahaan Umum Listrik Negara adalah:

1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam arti yang seluas – luasnya dan sekaligus menumpuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonmi.
3. Mengusahakan keuntungan sehingga dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi perintis kegiatan – kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang belum dapat di laksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
5. Menyelenggarakan usaha – usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan – peraturan yang berlaku.

Anggaran dasar PLN menyatakan bahwa maksud dan tujuan perusahaan adalah berusaha dalam bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam arti seluas – luasnya dan sekaligus membuat keuntungan berdasarkan pengelolaan perusahaan

Sebagai perusahaan Persero, misi perusahaan dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, berdasarkan kaidah bisnis yang sehat, guna menjamin keberadaan dan pengembangannya dalam jangka panjang.
2. Melakukan kegiatan yang mendukung pembangunan nasional dan bersifat perintis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.

Sebagai pemegang kuasa usaha kelistrikan, PLN melakukan usaha ketenagalistrikan yang terdiri dari dua usaha yaitu usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik meliputi usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik. Sedangkan kegiatan penunjang tenaga listrik, kegiatan usahanya meliputi usaha studi dan rekayasa, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan manajemen, pengembangan teknologi dan pemeliharaan peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik.

Dalam usaha penyediaan tenaga listrik, PLN melakukan berbagai kegiatan yang hasilnya adalah untuk memenuhi kebutuhan energi listrik untuk kegiatan industri, usaha komersial, rumah tangga dan kegiatan sosial lainnya.

Di samping melakukan usaha sebagai perusahaan, sesuai misinya maka PLN mempunyai tugas pokok lain sebagai agen pembangun: yang harus mengemban amanat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi. Kesejahteraan yang perlu di tingkatkan bukan hanya terbatas di lingkungan perkotaan atau industri saja, tetapi merata di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu kegiatan penting yang telah dilakukan di antaranya program listrik pedesaan dan program pembinaan usaha kecil dan koperasi.

4.3. Program Listrik Pedesaan

Kegiatan ini adalah usaha PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah untuk meningkatkan jumlah desa berlistrik di wilayah kerjanya. Pada tahun 1997 sebanyak 8459 desa telah di aliri listrik atau 94,70% desa berlistrik. Pada tabel 4.1 dapat dilihat perkebangan listrik masuk desa dari tahun 1989 sampai tahun 1997.

Tabel 4.1.
Jumlah Desa dan Pelanggan Listrik Pedesaan

Tahun	Jumlah Desa	Yang telah di listriki		Jumlah Pelanggan
		Desa	(%)	
1989/ 90	8.892	4.879	54,87	560.586
1990/ 91	8.892	5.606	63,05	682.945
1991/ 92	8.917	5.887	66,02	703.364
1992/ 93	8.917	6.124	68,68	763.067
1993/ 94	8.917	6.909	77,48	1.052.988
1994(April –Des 94)	8.933	7.294	81,65	1.357.889
1995	8.933	7.690	86,09	1.797.794
1996	8.932	8.070	90,35	2.181.211
1997	8.932	8.459	94,70	2.627.771

Sumber : Data & Statistik PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah 1997

Dengan semakin meluas dan meningkatnya jangkauan program listrik masuk desa sejak tahun 1991 PLN mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang kelistrikan desa dengan Koperasi Unit Desa (KUD). Kerjasama tersebut berupa pembacaan meter, pelaksanaan penagihan, pemeliharaan jaringan, pemasangan instalasi rumah tangga, pemasangan jaringan tegangan rendah, pemeriksaan alat pengukur dan penyuluhan. Pada tabel 4.2 dapat dilihat tempat pembayaran rekening listrik pedesaan, di mana KUD yang paling banyak melakukan kerjasama.

Tabel 4.2.
Tempat Pembayaran Rekening Listrik Pedesaan

PELAKSANA	JUMLAH TITIK BAYAR	JUMLAH LOKET
Koperasi Unit Desa	677	773
Desa/ Kelurahan/ Kecamatan	89	104
Koperasi	20	18

Sumber : Data & Statistik PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah 1997

4.4. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dengan adanya perkembangan lingkungan bisnis untuk menghadapi persaingan bebas, maka PLN memandang penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang tanggap dan mampu bersaing dan menyesuaikan diri untuk menghadapi persaingan bebas atau globalisasi yang akan di hadapi nanti. Di mana pada era globalisasi PT. PLN akan menghadapi pesaing dari luar negeri yang masuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Oleh sebab itu program pengembangan sumber daya manusia PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah di arahkan untuk mendidik karyawan agar mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan lingkungan bisnis kelistrikan baik nasional maupun internasional. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah melakukan langkah – langkah antara lain meningkatkan keikutsertaan dalam forum seminar tingkat nasional maupun internasional, mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di dalam dan luar negeri.

4.5. Kepagawaian

Jumlah pegawai PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah sampai akhir tahun 1997 menurut golongan dapat dilihat pada tabel 4.3, sedangkan jumlah pegawai menurut jenjang pendidikannya dapat di lihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.3.
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

PLN Unit	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Calon Pegawai	Jumlah	Tenaga harian	Jumlah
Kantor ditribusi	81	145	100	18	4	348	56	404
Cab. Semarang	77	318	22	1	0	418	9	427
Cab. Surakarta	36	315	13	0	1	365	8	373
Cab. Yogyakarta	53	260	13	0	0	326	6	332
Cab. Puwokerto	37	161	13	0	0	211	4	215
Cab. Tegal	37	159	10	0	0	206	11	217
Cab. Magelang	39	196	12	0	0	247	3	250
Cab. Kudus	44	183	13	0	0	240	4	244
Cab. Salatiga	32	78	4	0	0	114	1	115
Cab. Klaten	19	123	4	0	1	147	3	150
Cab. Pekalongan	17	60	4	0	0	81	1	82
Cab. Cilacap	8	87	4	0	0	99	2	101
Distribusi Jateng	480	2.085	212	19	6	2.802	108	2.910
Prop. Jateng	427	1.825	199	19	6	2.476	102	2.578
Prop. D.I.Y	53	260	13	0	0	326	6	332

Sumber : Data & Statistik PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah 1997

Tabel 4.4.
Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

PLN Unit	Sarjana	Sar. Muda	SLTA	SLTP	SD	Sub Jumlah	Tenaga Harian	Jumlah
Kantor ditribusi	70	63	178	45	39	395	56	451
Cab. Semarang	18	39	205	128	25	415	9	424
Cab. Surakarta	10	17	242	57	7	333	8	341
Cab. Yogyakarta	6	25	233	45	17	326	6	332
Cab. Puwokerto	6	11	143	40	14	214	4	218
Cab. Tegal	6	7	140	50	11	214	11	225
Cab. Magelang	15	15	163	42	11	246	3	249
Cab. Kudus	6	15	169	0	22	212	4	216
Cab. Salatiga	4	11	56	43	2	116	1	117
Cab. Klaten	3	9	118	19	1	150	3	153
Cab. Pekalongan	1	2	82	17	6	108	1	109
Cab. Cilacap	2	4	55	11	1	73	2	75
Dis. Jateng	147	218	1.784	497	156	2.802	108	2.910
Prop. Jateng	141	193	1.551	452	139	2.476		2.578
Prop. D.I.Y	6	25	233	45	17	326		332

Sumber : Data & Statistik PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah 1997

Dari tabel 4.3. dapat di lihat jumlah pegawai terbanyak adalah golongan II, sedangkan menurut jenjang pendidikannya, dari tabel 4.4 dapat di lihat jumlah pendidikan terbanyak adalah SLTA.

Berdasarkan standar pengukuran produktivitas pegawai yang di lakukan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

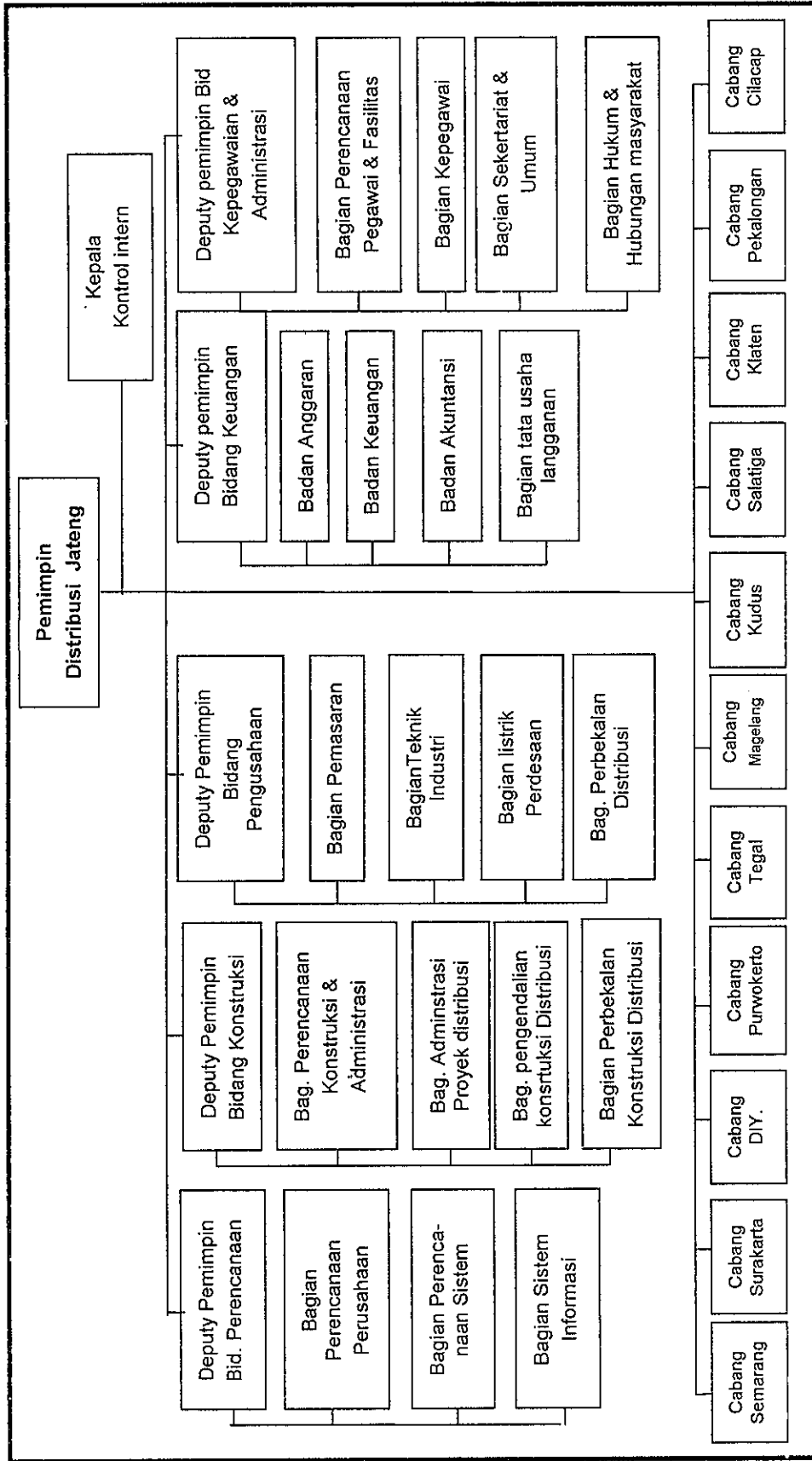
Tabel 4.5.
Produktivitas Pegawai

PLN Unit	Pelanggan per pegawai	kWh Terjual per pegawai
Cab. Semarang	1.515	4.265.351
Cab. Surakarta	1.773	3.336.825
Cab. Yogyakarta	1.549	2.242.977
Cab. Puwokerto	1.739	1.915.181
Cab. Tegal	2.286	2.496.377
Cab. Magelang	1.481	1.376.499
Cab. Kudus	2.246	2.293.430
Cab. Salatiga	1.388	3.461.864
Cab. Klaten	1.851	1.341.571
Cab. Pekalongan	1.754	2.097.731
Cab. Cilacap	3.615	3.234.585
Distribusi Jateng	11.029	16.747.19
Prop. Jateng	1.332	2.001.361
Prop. D.I.Y	1.549	2.242.977

Sumber : Data & Statistik PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah 1997

Dari tabel 4.5 dapat di lihat produktivitas pegawai berdasarkan pelanggan per pegawai, cabang Magelang mempunyai produktivitas pegawai terendah, sedangkan cabang Cilacap mempunyai produktivitas tertinggi. Berdasarkan kWh terjual per pegawai, produktivitas pegawai tertinggi adalah cabang Semarang dan cabang Magelang mempunyai produktivitas terendah.

Tabel 4.6.
Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah



Sumber : Data & Statistik PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah 1997 - 1994

4.6. Kebijakan Akuntansi Penting

Penyajian laporan keuangan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah di susun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, berdasarkan standart akuntansi keuangan Indonesia dengan konsep harga perolehan. Laporan keuangan yang di sajikan adalah; neraca, laba - rugi, Aktiva tetap dan penyusutan, dan piutang langganan, yang akan di sajikan dalam tabel 4.7., 4.8., 4.8., 4.9, dan 4.10.

Beberapa kebijakan akuntansi penting yang di gunakan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkaitan erat dengan penyusunan laporan nilai tambah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan

Pendapatan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah berasal dari penjualan tenaga listrik dan dari penyambungan pelanggan. Pendapatan penjualan tenaga listrik merupakan rekening yang di keluarkan pada bulan yang bersangkutan, merupakan pendapatan utama. Pendapatan ini masih di rinci lagi berdasarkan golongannya, antara lain rumah tangga dan industri. Penerimaan dari biaya penyambungan bagi pelanggan di klasifikasikan sebagai pendapatan yang di tangguhkan dan diamortasi sebesar 5% per tahunnya. Neraca dan Laba Rugi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dapat di lihat pada tabel 4.7 dan tabel 4.8.

Tabel 4.7.
Neraca PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah
Tahun 1994 – 1997 (dalam Juta Rp.)

KETERANGAN	1997	1996	1995	1994 (9 April–Des 94')
AKTIVA TETAP				
- Jumlah Aktiva Tetap	1.563.094	1.314.739	1.104.413	897.236
- Akumulasi penyusutan	(476.266)	382.508	314.887	260.313
JUMLAH AT (Bersih)	1.086.827	932.141	789.526	623.923
Pekerjaan dlm pelaksanaan	143.479	108.494	152.093	173.470
Aktiva lainnya	10.677	15.906	12.256	9.767
Dana Pelunasan Obligasi	--	--	--	--
AKTIVA LANCAR				
- Kas & bank	10.613	13.309	27.966	15.470
- Piutang	111.347	88.872	71.662	65.964
- BBM & Pemeliharaan	12.768	11.015	7.230	8.797
- Aktiva lancar lainnya	3.339	2.904	3.062	2.400
JUMLAH AKTIVA LANCAR	138.067	116.101	109.920	92.703
JUMLAH AKTIVA	1.379.051	1.172.643	899.446	729.626
MODAL				
SALDO LABA	96.909	756.906	--	--
AKUN ANTAR SATUAN ADM.	716.510	(47.524)	667.311	581.643
PEN. DI TANGGUHKAN	322.177	280.692	240.697	195.181
KEWAJIBAN J. PANJANG				
- Pinjaman Jangka Panjang	0	0	0	0
- Obligasi	0	0	0	0
- UJL	154.350	130.547	108.914	88.664
- Kew. Jangka Panjang Lainnya	40.689	16.323	4.799	9.193
KEWAJIBAN JNK. PANJANG	195.040	146.870	113.713	97.857
KEWAJIBAN JNK. PENDEK	48.414	35.698	42.074	36.182
JML . MODAL & KEWAJIBAN	1.379.051	1.172.643	1.063.795	912.863

Sumber : Data & Statistik PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah 1997

Tabel 4.8.
 Laba Rugi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah
 Tahun 1994 – 1997 (dalam Juta Rp.)

KETERANGAN	1997	1996	1995	1994 (9 April–Des 94')
PENDAPATAN OPERASI				
- Penjualan Tenaga Listrik	1.053.1082	897.367	781.380	500.077
- Biaya Penyambungan	22.064	18.365	15.461	8.738
- Lain – lain	5.316	5.452	4.877	3.074
Jumlah Pendapatan Operasi	1.080.562	921.144	801.718	511.889
BIAYA OPERASI				
- Pembelian tenaga listrik	784.313	680.900	400.835	471.589
- BBM & Minyak Pelumas	0	0	0	0
- Peliharaan	035.403	22.158	11.912	12.750
- Kepegawaian	57.371	50.151	23.881	26.492
- Penyusutan AT.	81.173	69.054	24.181	36.936
- Lainnya	25.393	19.909	13.478	14.307
Jumlah Biaya Operasi	993.653	842.178	739.146	62.273
LABA RUGI OPERASI	993.653	842.178	739.146	62.273

Sumber : Data & Statistik PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah 1997

Sedangkan aktiva tetap dan penyusutannya dapat di lihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9.
 Aktiva Tetap & Penyusutan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah
 Tahun 1994 – 1997 (dalam Juta Rp.)

T A H U N	Saldo	Akumulasi Penyusutaan	Nilai Buku
1994 (April – Des '94)	897.236	260.313	636.923
1995	1.104.143	314.888	189.526
1996	1.314.739	382.598	932.141
1997	1.563.094	476.266	1.086.827

Sumber : Data & Statistik PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah 1997

2. Beban

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah mengakui beban dengan metode aktual. Adapun beban yang di tanggung PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dapat di lihat pada tabel 4.10 berikut ini.

Tabel 4.10

Piutang Pelanggan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah
Tahun 1994 – 1997 (dalam jutaan Rp.)

TAHUN	UMUM	TNI	NON TNI	PEMDA	BUMN	JUMLAH
1994 (April – Des. 94)	56.115,08	397,03	2.177,24	1.485,06	2.143,00	62.258,31
1995	60.331,52	493,10	1.407,10	1.673,05	2.001,87	65.906,64
1996	73.658,13	441,48	1.763,12	1.997,20	2.346,84	80.207,25
1997	104.185,29	589,61	1.524,18	2.523,83	3.131,44	111.954,33

Sumber: Data & Statistik PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah 1997

3. Aktiva tetap

a. Aktiva aktif/ operasional

Penyusunan aktiva tetap, kecuali hak atas tanah tidak di susutkan, di laksanakan dengan prosentase tetap dari harga perolehan tiap jenis aktiva tetap, sesuai dengan masa manfaat aktiva tetap tersebut.

b. Aktiva tidak beroperasi

Aktiva tidak beroperasi adalah aktiva tetap untuk sementara waktu, tidak di gunakan karena kondisi fisik teknis/ efektifitas/ ekonomis yang tidak memungkinkan lagi:

Aktiva jenis ini tidak di susutkan sampai di gunakan kembali, atau atas persetujuan Direksi. Aktiva tersebut di klasifikasikan sebagai aktiva afkir dan di dikeluarkan dari pembukuaan atau di jual. Aktiva yang di opsikan kembali di refeksikan sebagai aktiva aktif dan di susutkan kembali.

4. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing di catat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat Transaksi di lakukan. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing di sesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut.

Laba atau rugi kurs yang terjadi dari transaksi dalam mata uang asing dan koversi aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing di kredit atau di bebankan pada usaha periode mendatang.

5. Pajak penghasilan

Pajak penghasilan di hitung berdasarkan taksiran laba kena pajak dalam tahun bersangkutan. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah tidak melakukan penanguhan pajak atas perbedaan waktu dalam pengakuan pendapatan dan beban, antara laporan untuk tujuan akuntansi dan pajak.

6. Distribusi laba

Sebagai perusahaan perseroan. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah memiliki kewajiban untuk membagikan deviden kepada para

pemegang saham. Saat ini pemegang saham tunggal adalah pemerintah Republik Indonesia. Di samping pemerintah Republik Indonesia, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah berkewajiban mengalokasikan dan memberikan sebagian saldo laba yang di peroleh kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi, kewajiban ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 1232/ KMK. 031/ 1989 tanggal 11 November 1989, yang berisikan tentang kewajinan BUMN untuk menyalurkan laba setelah pajak sebesar 1% sd 5% kepada pengusaha ekonomi lemah dan koperasi. Ketetapan mengenai besarnya alokasi saldo laba pada pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi tersebut di tetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Program pensiun

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun bagi seluruh karyawannya, dan di kelola oleh dana pensiun PLN. Kontribusi pensiun di tentukan dengan perhitungan aktuarial secara berkala. Kontribusi bayaran untuk dana pensiun adalah 6% dari gaji bruto, sedangkan perusahaan memberikan tambahan berupa iuran Perusahaan sebesar 33,58% dari gaji bruto. Sisa dana yang di perlukan untuk membentuk program pensiun tersebut di tanggung perusahaan.

4.7. Kinerja PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah

Penilaian kinerja PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah di dasarkan atas Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 740/ KMK.00/ 1989 tentang peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMN, yang dalam pengertiannya, efisiensi di artikan sebagai kemampuan untuk memperoleh hasil atau keluaran tertentu dengan menggunakan masukan yang serendah – rendahnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, di lakukan penilaian BUMN yang meliputi rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas. Di luar ketentuan tersebut, masih ada faktor yang di gunakan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah yaitu ROI dan ROE, serta tabel 4.5. di atas yaitu produktivitas berdasarkan pelanggan per pegawai dan kWh Terjual per pegawai. Rentabilitas, Likuiditas, Solvabilitas, ROI dan ROE PT. PLN (Persero) dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10.
Rentabilitas, Likuiditas, Solvabilitas, ROI dan ROE
PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah
Tahun 1994 – 1997 per 31 Desember

TAHUN	RENTABILITAS (%)	LIKUIDITAS (%)	SOLVABILITAS (%)	ROI (%)	ROE (%)
1994 (April–Des)	102,597	242,789	(96,034)	77,054	19,953
1995	82,819	96,664	(100,348)	74,265	84,551
1996	8,303	325,229	(106,743)	0,007	89,391
1997	8,732	285,178	(107,743)	7,912	88,822

Sumber: Data & Statistik PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah 1994 - 1997 yang Di olah

BAB V

ANALISA LAPORAN NILAI TAMBAH PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TENGAH

5.1. Perhitungan Nilai Tambah

Laporan nilai tambah yang akan di laksanakan dalam penelitian ini, adalah laporan nilai tambah netto, dengan asumsi penentuan nilai penyusutan yang di lakukan perusahaan objektif. Sehingga laporan nilai tambah yang di hasilkan objektif pula.

Untuk melakukan penyusunan laporan nilai tambah perlu di lakukan penggolongan – penggolongan terhadap pos – pos pendapatan dan biaya yang terdapat di laporan laba rugi. Langkah ini di lakukan untuk mempermudah proses penyusunan laporan nilai tambah. Persamaan yang di gunakan untuk penyusunan laporan nilai tambah adalah modifikasi laporan laba rugi yaitu :

$$S - B - \text{Dep.} = W + I + \text{Div} + R + T \quad \dots\dots(5.1)$$

Penyusunan laporan nilai tambah di lakukan dengan metode pengurangan, yaitu pada persamaan sebelah kiri, variabel S (sales) di definisikan sebagai pendapatan penjualan, variabel B (bought in material and

service) merupakan bahan dan jasa yang di beli/ berasal dari luar perusahaan dan variabel Dep. (Depresiasi) adalah penyusutan terhadap barang yang di gunakan. Di samping ke tiga variabel tersebut masih ada dua komponen yang ikut juga menciptakan nilai tambah, yaitu pendapatan/ laba di luar usaha sebagai komponen penambah, dan beban/ rugi di luar usaha sebagai komponen pengurang.

Penyusunan nilai tambah metode pengurangan di sajikan pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1.
Perhitungan Nilai Tambah Dengan Metode Pengurangan Untuk PT. PLN (Persero)
Distribusi Jawa Tengah Tahun 1994 – 1997 (ribuan Rp.)

Pendapatan	1994	1995	1996	1997
Penjualan tenaga listrik	646.811.906	781.380.304	897.367.301	1.053.181.924
Penyambungan pelanggan	13.028.266	15.461.042	18.365.352	22.064.103
Pendapatan lain-lain	4.758.343	4.876.806	5.451.681	5.316.200
Akumulasi penusutan	-260.313.281	-314.887.538	-382.597.827	-476.266.235
Total	404.285.234	486.830.614	538.586.507	604.295.992
Bahan & Jasa di beli/ berasal dari luar				
Pembelian tenaga listrik	400.835.000	604.692.000	680.900.000	748.313.000
BBM dan Minyak Pelumas	8.797.919	7.229.871	11.015.179	12.768.000
Pemeliharaan	15.835.110	21.998.880	22.157.720	35.403.363
Kepegawaian	31.240.003	38.541.128	50.150.747	57.371.363
Administrasi & umum	17.857.242	38.233.000	50.151.000	57371000
Penyusutan aktiva tetap	37.463.192	55.210.710	69.061.460	81172634
Lain - lain	13.478.000	19.011.000	19.908.897	25.393.000
Total	525.506.466	784.916.589	903.345.003	1.017.792.360
Nilai Tambah Usaha Pokok	121.221.232	298.085.975	364.758.496	413.496.368
Pendapatan/ laba di luar usaha				
Jasa giro & bunga deposito	15.470.000	27.966.000	13.309.000	10.613.000
Pendapatan denda	66.946.000	71.662.000	88.872.000	111.347.000
Pendapatan rupa - rupa	2.490.000	3.062.000	2.904.000	3.339.000
Tagihan susulan OPAL	347.521.437	484.474.391	854.829.881	1.018.284.824
Total	432.427.437	587.164.391	959.914.881	1.143.583.824
Beban / Rugi di luar usaha				
Rugi penarikan aktiva tetap	34.181.000	55.211.000	69.061.000	81.173.000
Penyisihan piutang & persediaan	62.258.000	65.906.001	80.207.000	111.954.000
Beban Rupa-rupa	9.193.000	4.799.000	16.323.000	40.689.000
Total	105.632.000	125.916.001	165.591.000	233.816.000
Total Nilai tambah Perusahaan	448.016.669	759.334.365	1.159.082.377	1.323.264.192

Sumber : Data & Statistik PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah 1997 – 1994 yang di olah

5.2. Rasio Analisa Produktivitas Dengan Nilai Tambah

5.2.1. Rasio nilai tambah per karyawan

Perhitungan rasio nilai tambah per karyawan mempunyai rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai tambah perkaryawan} = \frac{\text{Nilai Tambah}}{\text{Jumlah tenaga kerja}}$$

Unit : Rupiah per karyawan

Arti rasio tinggi : makin tinggi rasio, berarti lebih banyak hal yang menguntungkan terhadap kemampuan menciptakan kekayaan perusahaan.

Arti rasio rendah : Menunjukkan jumlah karyawan, atau prosedur kerja yang kurang baik

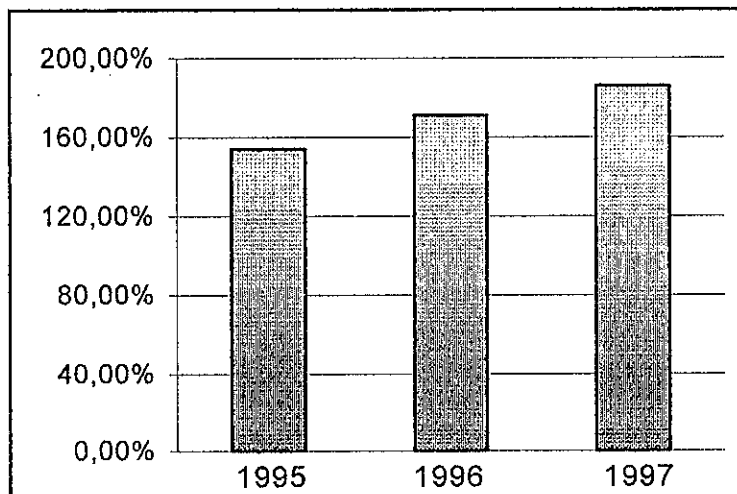
Untuk perhitungan dapat di lihat pada lampiran A

Tabel 5.2.

Hasil Perhitungan Rasio Nilai Tambah Per Karyawan

Tahun	Rasio (Rp./TK)	Selisih Rasio (%)
1994 (april -Des. '94)	150949021,47	
1995	279064448,73	154,09%
1996	391581884,12	171,27%
1997	454729962,89	186,11%

Sumber: Data & Statistik PT. PLN yang Di olah



Dari hasil perhitungan nilai tambah per karyawan dapat dilihat bahwa rasio dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 mengalami kenaikan, ini berarti karyawan mempunyai kinerja yang baik sehingga dapat menciptakan kemajuan perusahaan, meskipun pada tahun 1997 terjadi krisis moneter. Hal ini harus di sadari oleh perusahaan untuk menjaga kualitas karyawan dan menerapkan prosedur kerja serta peraturan yang telah dilakukan agar terus di pertahankan dan atau bahkan di tingkatkan.

5.2.2. Rasio penjualan per tenaga kerja

Perhitungan rasio penjualan per tenaga kerja menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio penjualan per TK} = \text{Rupiah per tenaga kerja}$$

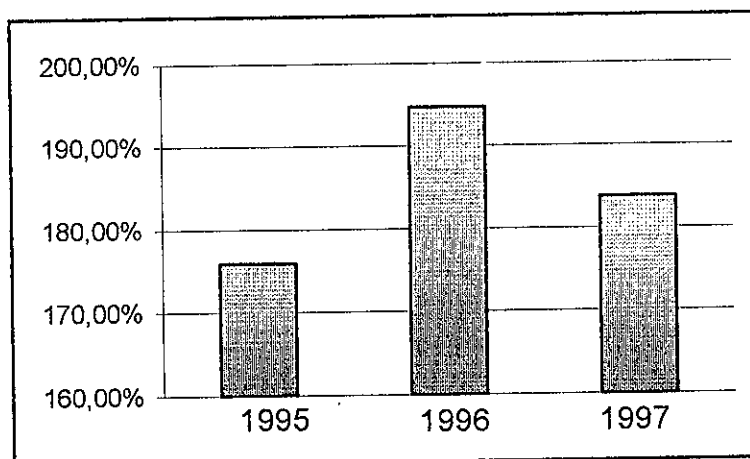
Arti rasio tinggi : mencerminkan efisiensi atau strategi perusahaan yang baik, makin tinggi makin baik keadaan perusahaan tersebut

Arti rasio rendah : mencerminkan efisiensi kurang baik atau pemasaran kurang baik, dapat juga diakibatkan oleh kebijakan perusahaan berkenaan perputran penjualan yang rendah, tetapi laba/ nilai tambah tinggi

Tabel 5.3.
 Hasil Perhitungan Rasio Penjualan per Tenaga Kerja

Tahun	Rasio (Rp./ TK)	Selisih Rasio (%)
1994 (april -Des. '94)	217928539,80	
1995	287166594,63	175,89%
1996	303255844,93	194,69%
1997	361918186,94	183,79%

Sumber: Data & Staisik PT. PLN yang Di olah



Dari hasil perhitungan rasio penjualan per tenaga kerja dapat di lihat dari tahun 1995 ke tahun 1996 terjadi kenaikan dari grafik rasio produktivitas, hal ini menunjukkan kinerja dan strategi perusahaan terhadap tenaga kerja baik, karena makin tinggi kenaikan rasio makin baik kinerja perusahaan tersebut.

Sedangkan pada tahun 1996 ke 1997 terjadi penurunan rasio, hal ini dimungkinkan karena terjadi krisis ekonomi sehingga perusahaan melakukan

strategi perputaran penjualan yang rendah dan atau meningkatkan efisiensi, guna meningkatkan nilai tambah perusahaan.

5.2.3. Rasio nilai tambah per rupiah modal (1)

Perhitungan rasio penjualan per tenaga kerja menggunakan perhitungan sebagai berikut:

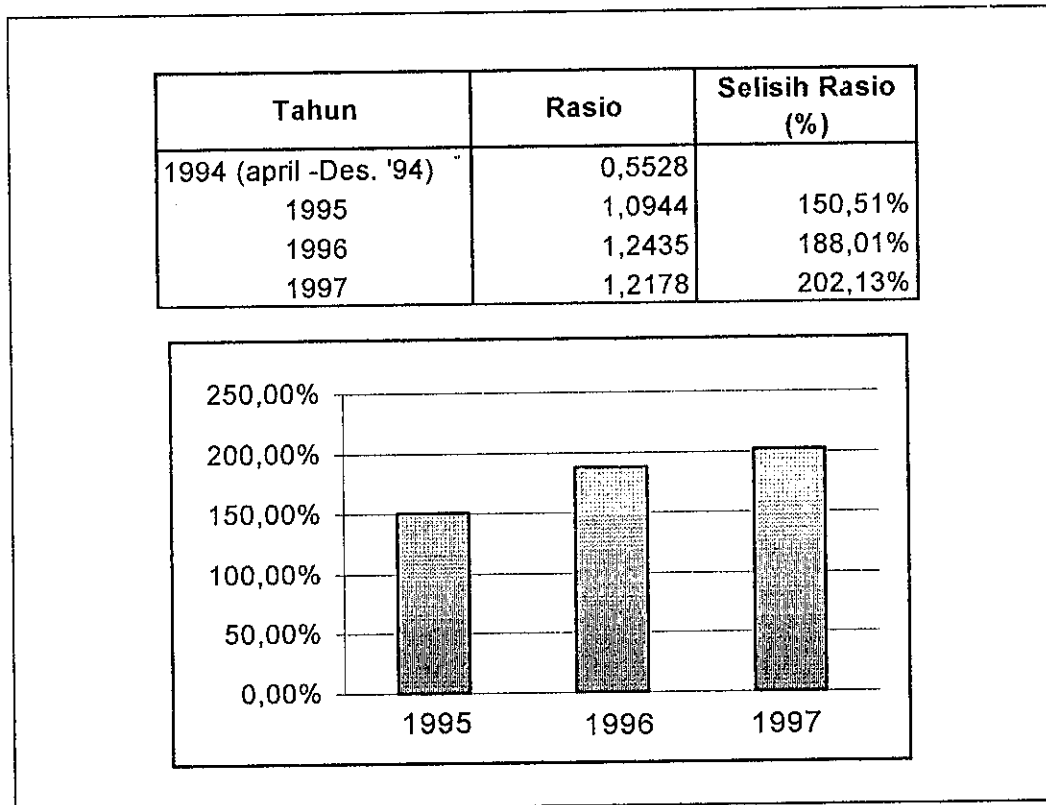
$$\text{Rasio nilai tambah per =} \frac{\text{Nilai Tambah}}{\text{Harta tetap berujud (rata-rata dlm 1 periode)}}$$

Arti rasio tinggi : mencerminkan efisiensi dari cara memanfaatkan aset, makin tinggi makin baik keadaan perusahaan tersebut

Arti rasio rendah : mencerminkan ketidak efisienan dalam pemanfaatan aset atau investasi yang berlebihan dalam aset tetap.

Tabel 5.4.

Hasil Perhitungan Rasio Nilai Tambah per Rupiah Modal (1)



Dari hasil perhitungan rasio nilai tambah per rupiah modal (1) terlihat grafik dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 mengalami kenaikan rasio produktivitas. Hal ini menunjukkan perusahaan dalam menangani aset tetap atau investasi dalam aset tetap sangat efisien. Hal ini menunjukkan kinerja perusahaan dalam mempergunakan aset tetap baik dan perlu di pertahankan serta di tingkatkan lagi.

5.2.4. Rasio nilai tambah per rupiah modal (2)

Perhitungan rasio penjualan per tenaga kerja menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio nilai tambah per =} \frac{\text{Nilai Tambah}}{\text{Modal Operasi (rata-rata dlm 1 periode)}}$$

Rupiah modal (2)

Arti rasio tinggi : menunjukkan aset - aset di pergunakan secara produktif, persediaan barang dan para distributor di awasi secara ketat, dan uang tunai di atur dan di kelola dengan baik. Makin tinggi rasio, makin baik bagi perusahaan.

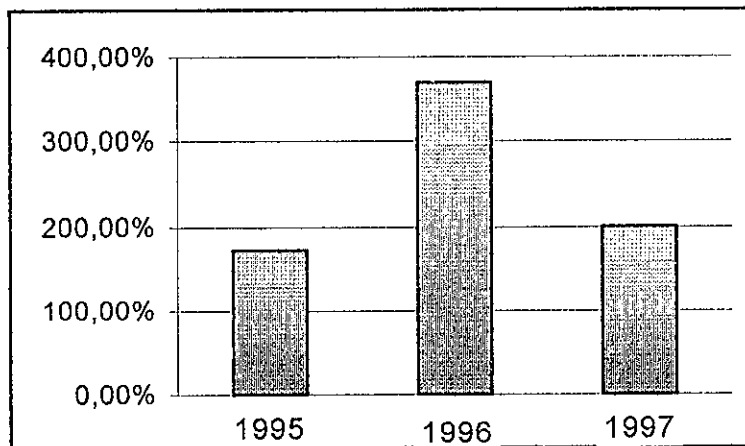
Arti rasio rendah : mencerminkan ketidak efisienan dalam penggunaan aset, kapasitas yang melebihi batas, tingkat persediaan barang dan para distributor terlalu tinggi menetapkan harga dan/ atau penggunaan aset di bawah optimal.

Tabel 5.5.

Hasil Perhitungan Rasio Nilai Tambah per Rupiah Modal (2)

Tahun	Rasio (NT/ MO)	Selisih Rasio (%)
1994 (april -Des. '94)	2,2964	
1995	3,1547	172,76%
1996	1,1707	369,47%
1997	1,1653	200,47%

Sumber: Data & Statistik PT. PLN yang Di olah



Dari hasil perhitungan nilai tambah per rupiah modal (2) dapat di lihat dari tahun 1995 ke 1996 rasio produktivitas mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa aset - aset di pergunakan secara produktif, persediaan barang dan hubungan dengan para distributor cukup baik, pengawasan di laksanakan secara ketat, dan uang tunai di atur dan di kelola dengan baik. Sedangkan di lihat dari tahun 1996 ke 1997 rasio produktivitas mengalami penurunan, yang menunjukkan ketidak efisienan dalam penggunaan aset. Hal ini di mungkinkan karena para distributor mengalami krisis moneter

sehingga harga menjadi tinggi dan/ atau perusahaan terlalu hati – hati dalam penggunaan dana.

5.2.5. Rasio nilai tambah per penjualan

Perhitungan rasio penjualan per tenaga kerja menggunakan perhitungan sebagai berikut:

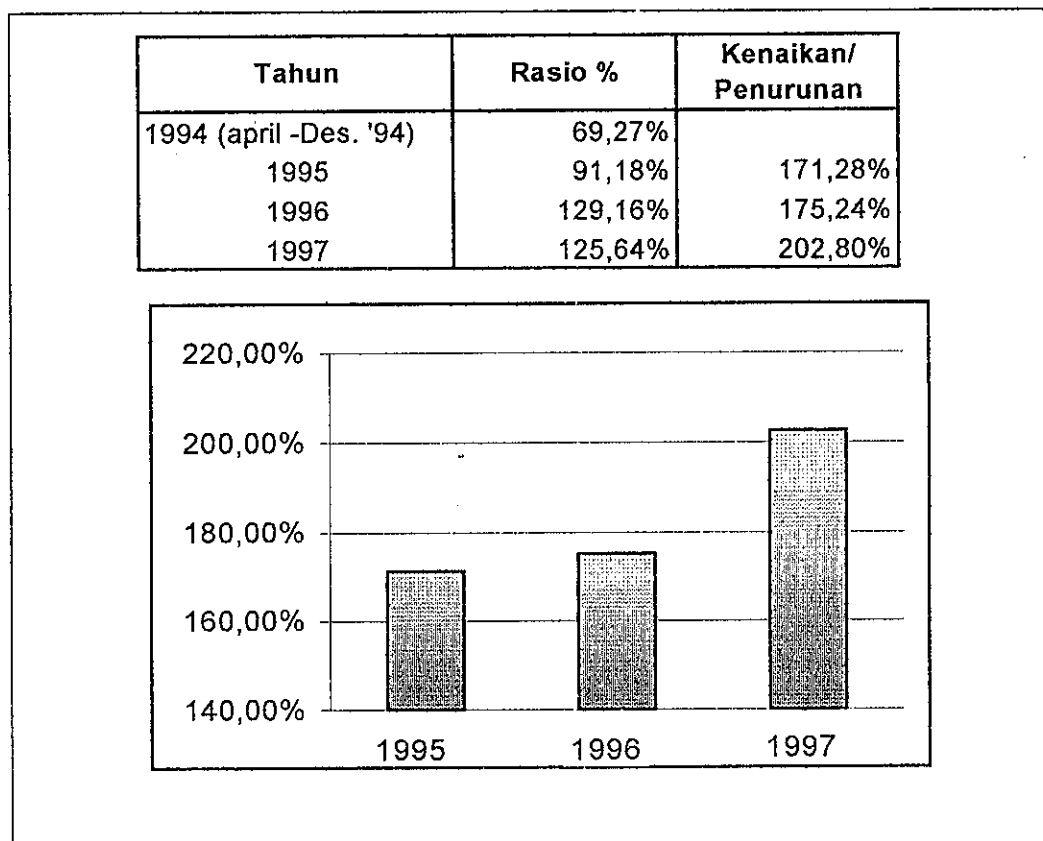
$$\text{Rasio nilai tambah per Penjualan} = \frac{\text{Nilai Tambah}}{\text{Modal Operasi}} \times 100$$

Arti rasio tinggi : tingkat maksimum rasio adalah 100%, jika tidak ada pembelian bahan atau jasa – jasa dari luar. Rasio yang tinggi mnggambarkan kebijakan dalam pembelian dilakukan dengan efisien.

Arti rasio rendah : jika rasio rendah bukan di karenakan kebijakan yang dibuat, maka hal tersebut di sebabkan ketidak efisienan dalam melakukan pembelian, atau pengawasan kurang baik terhadap persediaan. Rasio rendah kebanyakan di pengaruhi oleh faktor – faktor ekstern.

Tabel 5.6.

Hasil Perhitungan Rasio Nilai Tambah per Penjualan



Dari hasil perhitungan rasio nilai tambah per penjualan dapat di lihat grafik dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 mengalami kenaikan rasio produktivitas, terutama dari tahun 1996 ke 1997. Hal ini menunjukkan kebijakan pembelian yang dilakukan cukup efektif terutama dari tahun 1996 ke 1997. Semua ini di karenakan perbedaan yang menguntungkan antara harga produk dan pembelian, terutama pada tahun 1996 ke 1997 pengawasan yang

di lakukan cukup efisien terhadap pesediaan, mungkin di karenakan terjadinya krisis moneter sehingga pembelian di lakukan se efisien mungkin.

5.2.6. Rasio penjualan per rupiah modal

Perhitungan rasio penjualan per tenaga kerja menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio penjualan per Rupiah modal} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Modal Operasi}} \quad \text{atau} \quad \frac{\text{Penjualan}}{\text{Aset tetap nyata}}$$

Arti rasio tinggi : jika rasio tinggi menunjukkan penggunaan modal efisien, atau pemasaran yang baik.

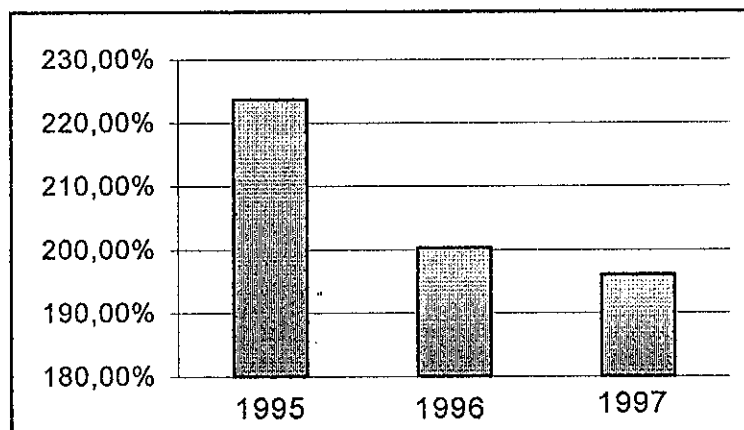
Arti rasio rendah : jika rasio rendah menunjukkan ketidak efisienan dalam penggunaan modal, atau pemasaran kurang baik.

Tabel 5.7.

Hasil Perhitungan Rasio Penjualan per Rupiah Modal

Tahun	Rasio (Penj./ MO)	Kenaikan/ Penurunan
1994 (april -Des. '94)	123,08%	
1995	99,54%	223,64%
1996	99,34%	200,21%
1997	103,48%	196,00%

Sumber: Data & Statistik PT. PLN yang Di olah



Dari hasil perhitungan rasio penjualan per rupiah modal terlihat grafik rasio produktivitas dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 terjadi penurunan yang cukup tajam, hal ini menunjukkan penggunaan modal tidak efisien. Kemungkinan ini terjadi karena adanya program listrik masuk desa, di mana ini merupakan proyek sosial bagi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah, karena pada tahun 1997, telah 90% lebih desa – desa di aliri listrik. Di tinjau dari pemasaran hal ini tidak menguntungkan secara permodalan, tetapi menguntungkan dalam segi politik.

5.2.7. Rasio modal per tenaga kerja

Perhitungan rasio penjualan per tenaga kerja menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Rasio modal per Tenaga kerja} = \frac{\text{Modal Operasi}}{\text{Jumlah karyawan}}$$

Arti rasio tinggi : jika rasio tinggi menunjukkan perusahaan padat modal

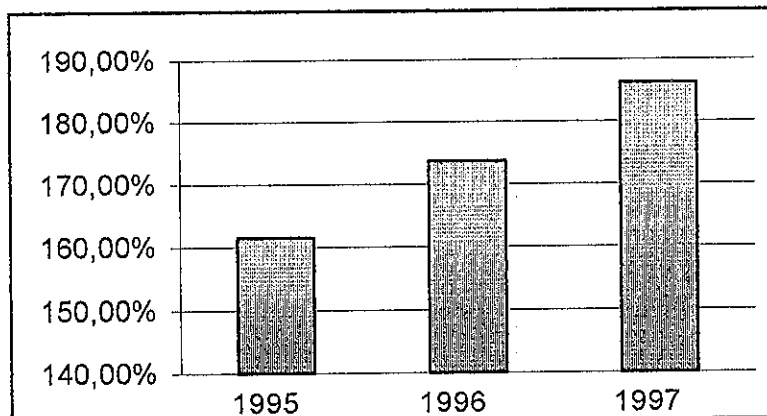
Arti rasio rendah : jika rasio rendah menunjukkan perusahaan padat karya

Tabel 5.8.

Hasil Perhitungan Rasio Modal per Tenaga Kerja

Tahun	Rasio %	Selisih Rasio (%)
1994 (april -Des. '94)	17705743463,61%	.
1995	28846622160,97%	161,38%
1996	39158188412,16%	173,67%
1997	45472995945,02%	186,11%

Sumber: Data & Statistik PT. PLN yang Di olah



Hasil perhitungan rasio produktivitas mengalami kenaikan terus dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1997, hal ini menunjukkan perusahaan merupakan perusahaan padat modal.

5.2.8. Rasio biaya tenaga kerja per jumlah karyawan.

Perhitungan rasio penjualan per tenaga kerja menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio biaya tenaga kerja per jml karyawan} = \frac{\text{Biaya tenaga kerja}}{\text{Jumlah karyawan}}$$

Arti rasio tinggi : jika rasio tinggi menunjukkan penghasilan yang tinggi bagi karyawan secara individual

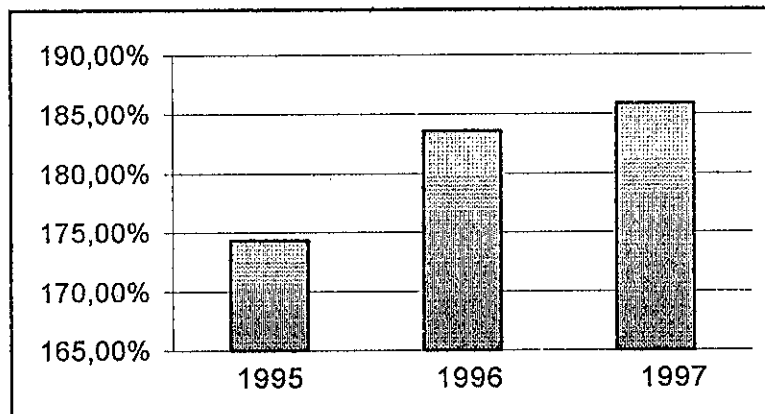
Arti rasio rendah : jika rasio rendah menunjukkan penghasilan yang rendah bagi karyawan secara individual

Tabel 5.9.

Hasil Perhitungan Rasio Biaya Tenaga Kerja per Jumlah Karyawan

Tahun	Rasio (%)	Selisih Rasio (%)
1994 (april -Des. '94)	1052560747,98%	
1995	1416432488,06%	174,31%
1996	1694281993,24%	183,60%
1997	1971524501,72%	185,94%

Sumber: Data & Statistik PT. PLN yang Di olah



Dari hasil perhitungan, dapat dilihat grafik rasio produktivitas dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 naik terus, terutama dari tahun 1995 ke 1996 terjadi kenaikan yang cukup besar, hal ini merupakan kenaikan penghasilan cukup besar bagi karyawan secara individu. Sedangkan dari tahun 1996 ke 1997 kenaikan rasio produktivitas tidak cukup besar, tetapi penghasilan karyawan secara individu tetap naik. Kemungkinan dari tahun 1995 ke 1996 ada kebijakan kenaikan gaji karena perusahaan bekerja secara efisien. Tetapi dari tahun 1996 ke 1997 karena adanya krisis moneter

ada kebijakan untuk memperketat ikat pinggang sehingga menaikkan penghasilan bagi karyawan secara individu di perketat pula.

5.2.9. Rasio laba per rupiah penjualan.

Perhitungan rasio penjualan per tenaga kerja menggunakan perhitungan sebagai berikut:

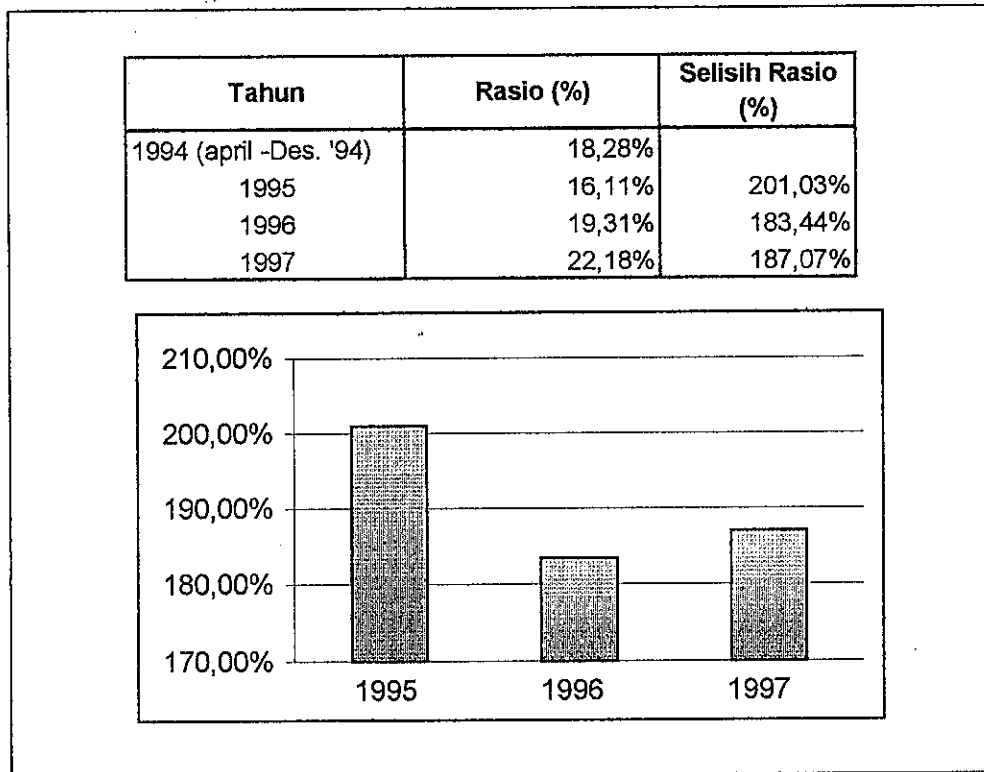
$$\text{Rasio laba per rupiah Penjualan} = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Penjualan}} \times 100$$

Arti rasio tinggi : sepanjang pembayaran kepada karyawan mencukupi, maka rasio haruslah setinggi mungkin. Hal ini berarti perusahaan mendapatkan banyak hasil dari sejumlah kegiatan atau penjualan tertentu.

Arti rasio rendah : jika rasio rendah, hal tersebut di sebabkan oleh sifat suatu industri, biasanya menunjukkan biaya produksi terlalu tinggi, yang mengakibatkan laba yang di terima sedikit.

Tabel 5.10.

Hasil Perhitungan Rasio Laba per Rupiah Penjualan.



Dari hasil perhitungan, dapat dilihat grafik rasio produktivitas tahun 1995 ke tahun 1996 terjadi penurunan yang cukup tinggi, hal ini menunjukkan biaya produksi terlalu tinggi, dan atau bisa juga pengawasan kurang ketat dan atau dapat juga pada periode tersebut di lakukan investasi yang cukup besar hingga mengakibatkan laba yang di terima sedikit.

Sedangkan pada tahun 1996 ke 1997, terjadi kenaikan rasio produktivitas, di mana kenaikan ini mungkin di sebabkan investasi yang di lakukan pada periode sebelumnya sudah mulai menghasilkan, atau pengawasan proses produksi sudah mulai di perketat.

BAB IV PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Penerapan teori enterprises melalui penyusunan laporan nilai tambah bagi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah sangat tepat, karena sebagai perusahaan, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah sekarang merupakan milik para tenaga kerja, masyarakat umum dan industri serta pemerintah, yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan tersebut dari segi pelayanannya, karena ketergantungan masyarakat terhadap tenaga listrik semakin tinggi, hingga di butuhkan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien. Dengan Laporan nilai tambah dapat di lihat kinerja dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah di mana kekurangan yang perlu di perbaiki maupun kelebihan yang perlu di pertahankan bahkan di tingkatkan.

Untuk menyusun laporan nilai tambah dapat di lihat pada BAB V yang mana hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Rasio nilai tambah per karyawan

Nampak faktor – faktor karyawan mempunyai kualitas yang baik sehingga dapat menciptakan kemajuan perusahaan.

2. Rasio penjualan per tenaga kerja

Dari tahun 1995 ke tahun 1996 efiensi atau strategi perusahaan terhadap tenaga kerja baik. Sedangkan pada tahun 1996 ke 1997

terjadi penurunan rasio, hal ini di mungkinkan karena perusahaan melakukan strategi meningkatkan efisiensi, yang berakibat nilai tambah perusahaan meningkat.

3. Rasio nilai tambah per rupiah modal (1)

Perusahaan dalam menangani aset tetap atau investasi dalam aset tetap sudah efisien.

4. Rasio nilai tambah per rupiah modal (2)

Dari tahun 1995 ke 1996 rasio mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa aset - aset di pergunakan secara produktif. Sedangkan dari tahun 1996 ke 1997 rasio mengalami penurunan, hal ini menunjukkan ketidak efisienan dalam penggunaan aset.

5. Rasio nilai tambah per penjualan

Dalam hal ini menunjukkan kebijakan pembelian yang di lakukan cukup efisien terutama dari tahun 1996 ke 1997.

6. Rasio penjualan per rupiah modal

Dari hasil perhitungan menunjukkan penggunaan modal tidak efisien.

7. Rasio modal per tenaga kerja

Dari hasil perhitungan menunjukkan perusahaan merupakan perusahaan padat modal.

8. Rasio biaya tenaga kerja per jumlah karyawan.

Dari hasil perhitungan, dapat di lihat kenaikan penghasilan karyawan secara individu meningkat.

9. Rasio laba per rupiah penjualan.

Dari tahun 1995 ke tahun 1996 terjadi penurunan yang cukup tinggi, biasanya menunjukkan biaya produksi terlalu tinggi. Sedangkan pada tahun 1996 ke 1997, terjadi kenaikan rasio cukup baik.

Penyusunan laporan nilai tambah merupakan usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan relevan mengenai kinerja perusahaan bagi para manajer maupun pihak lain seperti masyarakat yang berkepentingan.

Dari hasil laporan nilai tambah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dapat di ketahui tingkat kesejahteraan karyawan cukup baik, dalam menangani aset dan investasi cukup baik, kebijakan pembelian cukup baik, tetapi penggunaan modal kurang baik dan biaya produksi terlalu tinggi pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1996.

Di samping itu laporan nilai tambah hanya bersifat membantu laporan keuangan yang telah biasa di lakukan, karena laporan nilai tambah mempunyai kekurangan bagi para pemakai yang tidak atau kurang memahami konsep laporan nilai tambah, laporan nilai tambah dapat membingungkan mereka, sebab besarnya nilai tambah suatu perusahaan bisa baik tetapi sebaliknya laba perusahaan turun. Hal ini menunjukkan kekayaan yang di ciptakan perusahaan lebih besar di distribusikan ke karyawan.

6.2 Saran

1. Di samping ada kelemahannya, laporan nilai tambah lebih besar manfaatnya di bandingkan kelemahannya. Karena laporan nilai tambah

dapat memberikan informasi yang lebih efektif dan relevan bagi para manajer yang mengerti laporan nilai tambah dalam pengambilan keputusan

2. Penggunaan laporan nilai tambah sudah sebaiknya untuk di budayakan bagi perusahaan – perusahaan, sebagai alat bantu laporan keuangan konvensional.
3. Untuk perusahaan yang melayani kepentingan umum seperti PT. PLN Distribusi Jawa Tengah sudah sepantasnya untuk menggunakan laporan nilai tambah, karena banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang kinerja perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aruman, Darandono, Ishak Rafick dan Suhariyanto (1987) "**Manisnya Investasi di Proyek Listrik**", SWA 03 XIII, 20 Februari – 12 Maret: 84 – 85.
- C, D, Ittner Summer (1994) "**An Examination of The Indirect Productivity Gain From Quality Improvement**", Production and Operation Management 3, No. 3.
- Christie, A.A. (1987) "**On Cross-Sectional Analysis in Accounting Reseach**", Journal of Accounting Economic (9): 231-258
- De Meyer, Arnaud, Jinchiro Naname, Jeffery G., Miller and Kars Fredows., February. (1987). "**Flexibility The Next Competitive Battle**", Manufacturing Portable Research Series, Boston University
- E, E, Adams J. E. Hershauer, and W, A, Ruch., (1996) "**Productivity and Quality Measurement and Public Administration**", Unniversity of Missouri
- Greene, James, H., (1986) "**Productional and Inventory Control Handbook**", 2rd ed New York: John Willey and Sons
- James, R, Evans and William, M, Lindsay., (1996) "**The Management and Control of Quality**", 3rd ed St Paul, Minn: West
- Joh, A, Young., (1985) "**Report of The President's Commision on Industrial Competitvenes**", President CEO Hewlett Packard
- Nuorayi, M.M. and D.P. Daroca (1996) "**Performance Evaluation and Measurement Issues.**", Journal of Managerial Issues (Summer): 206 – 217
- Peter, B, Turney., And Bruce, Andersons., Winter (1980) "**Accounting for Contineous Improvmant**", Sloan Management
- Porter, Michel., (1985) "**Competitive Advantage**", New York: Free Press

- Ricardo, Manurung, Ir., Januari 1991 "**Peningkatan Produktivitas dan Hubungan Industrial Pancasila**",. Seminar Nasional Pengajaran Manajemen Sumber Daya Manusia PAU Studi Ekonomi UGM., Ambarukmo Hotel Yogyakarta
- Ruddy Kaharudin Gobel/ CEA (1990) "**Meningtkan Kinerja Dengan Open Book Management**",. Manajemen, No: 128, April: 53 – 53
- Sumber PPH/ Fat (1996) "**Penentuan Tujuan dan Strategi Untuk Mencapai Produktivitas**",. PRO PRODUKTIVITAS Ed. 7: 25 – 26
- Tully, S. (1993) "**The Real Key to Creating Welth.**",. Fortune (September 20): 35 – 80
- Tuty Herlina (1998) "**SDM dan Keunggulan Kompetitif yang Berkesinambungan: suatu Perspektif Berbasis Kompetisi**",. Usahawan, No: 09 Th. XXVII September:24 – 28
- Soemarso, S.R. (1982) "**Akuntansi Suatu Pengantar**",. Buku, Satu, Ed. Kedua Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia